

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP POLITIK
IDENTITAS DALAM PEMILIHAN PRESIDEN
TAHUN 2019**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

ACHMAD JUNAEDY MUCHTAR

NPM: 1421020151

Program Studi: Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1443 H/ 2021 M**

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP POLITIK
IDENTITAS DALAM PEMILIHAN PRESIDEN
TAHUN 2019**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

ACHMAD JUNAEDY MUCHTAR

NPM. 1421020151

Program Studi : Siyash Syar'iyyah (Hukum Tata Negara)

Pembimbing I : Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H.

Pembimbing II : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1443 H/2021 M**

ABSTRAK

Politik identitas harus dilekatkan pada konsep identitas itu sendiri atau biasa disebut juga sebagai jati diri. Identitas atau jati diri adalah pengakuan terhadap seorang individu atau suatu kelompok tertentu yang dikaitkan dilekatkannya rangkaian ciri-ciri atau karakteristik tertentu yang menjadi satu kesatuan yang menandainya masuk dalam satu kelompok atau golongan tertentu.

Pemilih di Indonesia pada dasarnya moderat dan pertimbangan pilihan dalam pemilu dipengaruhi oleh faktor pertimbangan terhadap kualitas personal dan kinerja calon dibandingkan dorongan politik keagamaan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana politik identitas dalam pemilihan presiden 2019 dan tinjauan *fiqh siyasah* terhadap politik identitas dalam pemilihan presiden.

Metode Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan berbagai literatur yang ada diperpustakaan yang relevan dengan masalah yang di angkat untuk diteliti. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data didapatkan dari buku-buku, literatur literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan. Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir secara deduktif.

Metode penelitian ini menunjukkan pengaruh Politik identitas dalam pemilihan presiden Tahun 2019 berpengaruh terhadap pelaksanaan pemilihan presiden Tahun 2019 dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Pendapat di Muka umum, serta Undang-undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan etnis. Sehingga hasil pemiliha presiden tidak sesuai dengan Undang-undang pemilihan umum yang disebabkan adanya praktek politik identitas akbitbatnya dapat merugikan calon presiden lain dan tidak membeikan pendidikan politik yang baik.

Tinjauan *fiqh siyasah* terhadap politik identitas dalam pemilihan presiden Tahun 2019 tidak di perbolehkan menurut hukum Islam.

Disebabkan bahwa ada landasan hukum tentang politik Islam antara lain: Al'Adalah (Keadilan), Al-Musawah (Persamaan), Karomah Insaniyah (Kehormatan Manusia), Tasamuh (Toleransi), Kebebasan, Kemerdekaan/Al-Huriyah, serta Perilaku Moral yang Baik (AlAkhlaq Karimah). Oleh karena itu politik identitas pada Tahun 2019 tidak sesuai dengan tujuan politik hukum Islam.

Kata kunci : *Fiqh Siyasah*, Politik Identitas, Pemilihan Presiden



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Junaedy Muchtar

NPM : 1421020151

Jurusan : Hukum tatanegara (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Politik Identitas Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2019**" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandarlampung, 06 Oktober 2021



Achmad Junaedy Muchtar

NPM. 1421020151



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

Alamat : Jl. Let. kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)703260

PERSETUJUAN

Nama : Achmad Junaedy Muchtar
NPM : 1421020151
Jurusan : Siyasah Syar'iyah
Fakultas : Syari'ah
Judul : TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP POLITIK
IDENTITAS DALAM PEMILIHAN PRÉSIDEN TAHUN
2019

MENYETUJUI

Untuk di munaqasahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasah
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H.
NIP. 196201111994031001

Pembimbing II

Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.
NIP. 197611142005011004

Ketua Jurusan

Frenki, M.Si
NIP. 198003152009011017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

Alamat : Jl. Let. kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Politik Identitas dalam Pemilihan Presiden 2019** oleh **Achmad Junaedy Muchtar NPM 1421020107** Jurusan: **Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)**, telah diujikan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Selasa, 30 November 2021

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Frenki, M.Si



Sekretaris : Hervin Yoki Pradikta, M.H.I



Penguji I : Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag



Penguji II : Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H



Penguji III : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Kumedhi Ja'far, S.Ag., M.H
NIP.197208262003121002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ
تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾
١ (النساء: 58)

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (QS. An-Nisa : 58)



PERSEMBAHAN

Dengan segala Kebahagiaan, karya tulis ini saya persembahkan untuk orang-orang yang selalu mendukung terselesaikannya karya ini, diantaranya :

1. Ayahanda Muchtar Ilyas yang telah mengajarkanku bertanggung jawab, rasa syukur atas apa yang didapat dan pembelajaran tidak pernah meyerah akan keadaan, terimakasih telah berusaha untukku dan terus memberi dukungan selama studi.
2. Ibunda Hj. Rakhmawati S.pd yang telah banyak berjuang dan mendo'akan untuk keberhasilanku, terimakasih untuk untaian do'a yang mengiringi setiap langkahku, ku sadari pengorbananmu tidak akan terbalas, yang senantiasa mencurahkan kasih sayangnya untukku, yang selalu memberikan semangat serta menuntunku dalam jalan hidupku yang Insha Allah selalu diridhoi-Nya, tiada henti-henti memberikan dukungan kepadaku, yang bersusah payah bekerja tanpa mengeluh demi masa depanku, semoga Allah subhanahu wataala selalu memberikan ibu kesehatan agar kelak ibu bisa melihatku tumbuh menjadi anak yang bisa membanggakanmu. Sekali lagi terimakasih Ibu yang sangat aku sayangi engkau adalah seorang wanita nomer satu untukku.
3. Adikku Nabila Azizah Muchtar yang aku sayangi, kegagalan bukanlah sebuah akhir, saat ini adek harus fokus menjalani studi untuk meraih gelar Sarjana, mungkin Allah punya rencana yang lebih baik untuk adek.
4. Anggun Destiani, S.H terimakasih karena sudah menjadi salah satu bagian dari proses pendewasaanku.
5. Teruntuk M. Aulia Rachman, S.H., M.H., Rahmat Fadil, S.H., dan Ivan David S. Sidabutar, S.Kom. yang telah banyak membantuku, serta mengajarkan sesuatu yang tidak aku pahami sebelumnya, membentuk pola pikirku agar dapat melihat bahwa dunia sangatlah luas untuk ditertawakan.

RIWAYAT HIDUP

Achmad Junaedy Muchtar, dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 08 Juni 1996. Anak ke satu dari 2 bersaudara, dari pasangan Bapak Muchtar Ilyas dan Ibu Hj. Rakhmawati, S.Pd. Riwayat pendidikan penulis yang telah diselesaikan :

1. SDN 2 Way Halim Permai, lulus pada tahun 2008
2. SMPN 19 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2011.
3. SMAN 5 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2014

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dan puji syukur atas nikmat yang Allah Swt berikan, serta berkat dorongan keluarga, ayah dan ibu tercinta, penulis memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah jurusan Siyasah Syar'iyah (Hukum Tatanegara) pada tahun 2014.



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt, Penguasa semesta alam, penentu setiap kehidupan yang ada dimuka bumi ini yang telah memberikan kekuatan kesehatan jasad dan kelembutan ruh kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka memenuhi syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dengan judul skripsi **“Tinjauan Fiqh Siyasaah Terhadap Politik Identitas dalam Pemilihan Presiden Tahun 2019”**

Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad Salallahu Alaihi Wassalam, ahlul bait beserta para sahabat dan pengikutnya yang ta'at pada ajaran Islam yang sungguh sempurna.

Skripsi ini dapat diselesaikan dengan dukungan dan bantuan para pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih secara moril maupun materil kepada :

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. H. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang selalu tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Frenki, M.S.i selaku Ketua Jurusan Siyasaah yang telah memfasilitasi segala kepentingan mahasiswa.
4. Dr. Drs. H. M. Wagianto, SH.,MH. dan Dr. Liky Faisal S.H., M.H. masing-masing selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu disela-sela kesibukan, serta memberikan bimbingan, arahan dan motivasi penulis sehingga skripsi ini selesai.
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran selama penulis duduk di bangku kuliah hingga selesai.

6. Pimpinan dan karyawan perpustakaan fakultas Syari'ah dan institut yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
7. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Syariah Khususnya Jurusan Syari'ah.

Bandarlampung, 06 Oktober 2021
Penulis,

Achmad Junaedy Muchtar
NPM. 1421020151



DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN	vi
PENGESAHAN.....	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub- Fokus Penelitian.....	4
D. Rumusan Masalah.....	4
E. Tujuan Penelitian	4
F. Manfaat Penelitian	5
G. Kajian Penelitian Penelitian Terdahulu yang Relevan	5
H. Metode Penelitian	6
I. Sistematika Pembahasan.....	7

BAB II LANDASAN TEORI

A. Politik Identitas	9
1. Politik identitas di Indonesia.....	11
2. Dasar hukum politik identitas	16
3. Politik Identitas di era post-truth.....	19
B. Pengaturan Sistem Pemilu di Indonesia.....	22
1. Pemilihan presiden di Indonesia	23
2. Kode etik pemilihan presiden	24
3. Lembaga pemilihan dan pengawas pilpres	25

C. Politik identitas dalam Islam.....	37
1. Sejarah politik identitas dalam Islam.....	38
2. Dasar hukum politik identitas dalam Islam	39
3. Islam dan politik identitas kontemporer	68

BAB III DESKRIPSI

A. Sejarah Pemilihan Presiden.....	69
1. Orde Lama	69
2. Orde Baru.....	70
3. Era Reformasi	72
B. Pelaksanaan Pemilihan Presiden.....	72
1. Dasar hukum pemilihan presiden 2019.....	73
2. Kondisi pemilihan presiden 2019	74
3. Hasil pemilihan presiden 2019.....	75

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Pengaruh Politik identitas dalam pemilihan presiden tahun 2019.....	77
B. Tinjauan fiqh siyasah terhadap politik identitas dalam pemilihan presiden tahun 2019.....	80

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	85
B. Rekomendasi.....	85

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan bagian amat penting dalam suatu karya ilmiah. Dari judul kita dapat mengetahui informasi yang tersedia, namun ada kalanya judul dapat ditafsirkan berbeda jika tidak dipahami dengan benar. Maka dari itu, perlu diadakan penegasan judul untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dan sama terhadap isi judul skripsi ini yaitu **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Politik Identitas dalam Pemilihan Presiden 2019”**, maka diperlukan pembatasan pengertian dan maksud dari istilah judul tersebut. Adapun dan pembatasan yang di maksud sebagai berikut:

1. Menganalisa politik identitas sebagai sebuah teori dalam ilmu politik perlu dilakukan dari berbagai sudut pandang agar memperoleh pengertian serta definisi yang objektif dan holistik. Memaknai politik identitas harus dilekatkan pada konsep identitas itu sendiri atau biasa disebut juga sebagai jati diri. Identitas atau jati diri adalah pengakuan terhadap seorang individu atau suatu kelompok tertentu yang dikaitkan dilekatkannya rangkaian ciri-ciri atau karakteristik tertentu yang menjadi satu kesatuan menyeluruh yang menandainya masuk dalam satu kelompok atau golongan tertentu.
2. konsep identitas secara umum dapat dimaknai sebagai sebuah citra yang membedakan individu atau suatu kelompok dengan individu atau kelompok lain, hal tersebut dilakukan secara simultan dalam interaksi sosial sampai memunculkan opini tertentu yang berkaitan dengan keberadaan individu atau kelompok tersebut.¹

¹ Sri AstutiBuchari, *Kebangkitan Etnis Menuju politik Identitas*, (Jakarta: YOI, 2014), h.27.

3. Politik identitas umumnya mengacu pada subset politik di mana kelompok orang dengan identitas ras, ras, agama, etnis, sosial atau budaya yang sama berusaha untuk mempromosikan kepentingan khusus mereka sendiri.

B. Latar Belakang Masalah

Menganalisa politik identitas sebagai sebuah teori dalam ilmu politik perlu dilakukan dari berbagai sudut pandang agar memperoleh pengertian serta definisi yang objektif dan holistik. Memaknai politik identitas harus dilekatkan pada konsep identitas itu sendiri atau biasa disebut juga sebagai jati diri. Identitas atau jati diri adalah pengakuan terhadap seorang individu atau suatu kelompok tertentu yang dikaitkan dilekatkannya rangkaian ciri-ciri atau karakteristik tertentu yang menjadi satu kesatuan menyeluruh yang menandainya masuk dalam satu kelompok atau golongan tertentu. Selain itu konsep identitas secara umum dapat dimaknai sebagai sebuah citra yang membedakan individu atau suatu kelompok dengan individu atau kelompok lain, hal tersebut dilakukan secara simultan dalam interaksi sosial sampai memunculkan opini tertentu yang berkaitan dengan keberadaan individu atau kelompok tersebut.

Penentuan politik identitas harus lebih dahulu dilakukan identifikasi bagaimana konstruksi sebuah identitas muncul yang menurutnya bisa dilihat dengan 3 model bentuk identitas, yaitu:

- a. *Legitimizing identity* atau legitimasi identitas, yaitu identitas yang dibangun oleh institusi (penguasa) yang dominan ada dalam kehidupan sosial. Institusi ini menunjukkan dominasinya dengan melekatkan sebuah identitas tertentu pada seseorang atau kelompok.

- b. *Resistance identity* atau resistensi identitas, yaitu identitas yang dilekatkan oleh aktor-aktor sosial tertentu dimana pemberian identitas tersebut dilakukan dalam kondisi tertekan karena adanya dominasi hingga memunculkan satu resistensi dan membentuk identitas baru yang berbeda dari kebanyakan anggota komunitas sosial yang lain, konstruksi identitas inilah yang dimaknai sebagai politik identitas.
- c. *Project identity* atau proyek identitas, konstruksi identitas pada model ini dilakukan oleh aktor sosial dari kelompok tertentu dengan tujuan membentuk identitas baru untuk bisa mencapai posisi posisi tertentu dalam masyarakat, hal ini bisa terjadi sebagai implikasi dari gerakan sosial yang bisa merubah struktur sosial secara keseluruhan.² Merujuk pada beberapa pemahaman diatas, politik identitas berakar pada *stereotype*³ yang dilekatkan dengan menggunakan perspektif *primordialisme*.⁴ Politik identitas selalu ada dalam wilayah ketegangan antara superioritas dan inferioritas, antara mayoritas dan minoritas. Maka dari itu dapat dipahami bahwa politik identitas adalah tindakan politis untuk mengedepankan kepentingan-kepentingan dari anggota-anggota suatu kelompok karena memiliki kesamaan identitas atau karakteristik, baik berbasiskan pada ras, etnisitas, jender, atau keagamaan. politik identitas merupakan rumusan lain dari politik perbedaan.⁵

² Manuel Castells, *The Power Of Identity: The Information Age, Economy, Society and Cultural*, Vol II (Australia: Blacwell Publishing, 2003) h.7.

³ Stereotipe adalah penilaian terhadap seseorang hanya berdasarkan persepsi terhadap kelompok di mana orang tersebut dapat dikategorikan.

⁴ Primordialisme adalah sebuah pandangan atau paham yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat-istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di dalam lingkungan pertamanya.

⁵ Parsudi Suparlan, *Hubungan Antar Suku Bangsa*, (Jakarta: KIK Press, 2004), h.25.

C. Fokus dan Sub- Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini adalah membahas tentang strategi politik identitas para calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan presiden tahun 2019 dan ditinjau menurut hukum Islam. Sub-fokus penelitian dalam penelitian ini adalah strategi untuk memperoleh suara dalam pilpres.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaruh Politik Identitas dalam Pemilihan Presiden Tahun 2019?
2. Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Politik Identitas dalam Pemilihan Presiden Tahun 2019?

E. Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian.
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan, maka dapat dikemukakan tujuan penelitian ini antara lain:
 - a. Untuk mengetahui Pengaruh Politik Identitas Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2019.
 - b. Untuk mengetahui Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Politik Identitas Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2019.
2. Kegunaan penelitian
 - a. Kegunaan secara Teoritis sebagai sumbangan ilmu pengetahuan kepada pembaca untuk mengetahui lebih rinci tentang Tinjauan *fiqh siyasah* Terhadap Politik Identitas Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2019.
 - b. Kegunaan praktis yaitu untuk wawasan bagi penulis, untuk memenuhi syarat akademik dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis pembahasan terhadap permasalahan-permasalahan sebagaimana yang telah di uraikan di atas, diharapkan akan memberikan pemahaman bagi pemerintah mengenai identitas dalam pemilihan presiden Tahun 2019 disuatu wilayah dan solusinya. Secara teoritis manfaat penulisan akan membawa perkembangan terhadap ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan sekaligus rujukan terutama dalam melakukan identitas dalam pemilihan presiden Tahun 2019.
2. Secara praktis, untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang permasalahan identitas politik yang terjadi pada setiap pesta demokrasi.

G. Kajian Penelitian Penelitian Terdahhulu yang Relevan

Setelah melakukan penelusuran di perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, penulis belum menemukan judul yang sama. Namun melalui penelusuran yang dilakukan penulis terhadap sejumlah penulisan karya ilmiah, penulis menemukan beberapa tema yang senada dengan penulisan ini, antara lain:

Penelitian Pertama dilakukan oleh Doni Sagiar Surbakti mahasiswa UIN Raden Intan Lampung dengan judul Partisipasi Politik Masyarakat pada Pilpres Tahun 2019 di Kecamatan Way Halim Bandar Lampung. Penelitian ini membahas mengenai peran masyarakat dimana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi tampak terlihat jelas. Partisipasi politik masyarakat merupakan salah satu bentuk aktualisasi dari proses demokratis.

Penelitian kedua dilakukan oleh Ovi Adiansyah mahasiswa UIN Raden Intan Lampung dengan judul Pandangan Hukum Islam Terhadap peran Partai Oposisi dalam Politik di Indonesia pasca Pemilu 2019. Penelitian ini membahas mengenai mengisyaratkan bahwa oposisi bukanlah sesuatu hal yang tabu dalam Islam.

H. Metode Penelitian

Agar sistematisnya dan akurat dalam pencapaian tujuan ini maka metode yang digunakan adalah:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian lapangan, dengan menggunakan berbagai literatur yang ada dipustaka yang relevan dengan masalah yang di angkat untuk diteliti.

2. Sifat Penelitian

Data yang diperoleh sebagai data yang sudah ada, yang dianalisis secara bertahap dan berlapis secara deskriptif, yaitu menyusun variabel demi variabel atau satu demi satu secara sistematis. Analisis, yaitu pengambilan kesimpulan dengan cara membandingkan dua hal atau variabel untuk mengetahui perbandingannya. kualitatif yaitu suatu metode dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi suatu sistem pemikiran, ataupun suatu peristiwa dalam masa sekarang. Dalam penelitian ini akan di deskripsikan tentang bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap pengaruh politik identitas.⁶

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian sebagai informasi yang dicari. Data primer dari penelitian ini adalah hasil dari pihak Pemerintah kota Bandar Lampung dan juga masyarakat kota Bandar Lampung.

⁶Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. Ke 22 (Bandung: Raja Resdakarya, 2004), h.174.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada, berupa bukti catatan, atau laporan historis terpercaya. Data sekunder yang digunakan peneliti diperoleh dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam mempermudah pembahasan penelitian ini, maka penulis akan membagi ke dalam lima bab yang berbentuk narasi atau uraian dan tentunya saling berkaitan antara satu bab dengan bab lainnya.

BAB I : Pendahuluan untuk mengetahui unsur-unsur yang terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan, sehingga dapat di pahami oleh pembaca.

BAB II : Landasan Teori yang meliputi pembahasan tentang Politik Identitas, Hukum Islam, Strategi, dan Pemilihan Presiden.

BAB III : Membahas tentang Gambaran Umum tentang Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Politik Identitas Dalam Pemilihan Presiden 2019.

BAB IV : Menganalisa Data yang meliputi Strategi Politik Identitas Calon presiden dan calon wakil presiden dalam pilpers 2019.

BAB V : Penutup sebagai akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dan rekomendasi

dari hasil temuan penelitian yang sudah dilaksanakan peneliti.

Kemudian pada bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka yang menjadi referensi dalam penelitian skripsi, selama melakukan penelitian.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Politik Identitas

Cressida Heyes dalam *Stanford Encyclopedia of Philosophy* mendefinisikan politik identitas sebagai penandaan aktivitas politis dalam pengertian yang lebih luas dan teorisasi terhadap ditemukannya pengalaman-pengalaman ketidakadilan yang dialami bersama anggota-anggota dari kelompok-kelompok sosial tertentu. Ada beberapa pemahaman yang muncul mengenai pemahaman tentang politik identitas sebagai sebuah teori dalam ilmu politik. Memaknai politik identitas harus dilekatkan pada konsep identitas itu sendiri disebut juga sebagai jati diri.⁷

Identitas atau jati diri adalah pengakuan terhadap seorang individu atau suatu kelompok tertentu yang dikaitkan dilekatkannya rangkaian ciri-ciri atau karakteristik tertentu yang menjadi satu kesatuan menyeluruh yang menandainya masuk dalam satu kelompok atau golongan tertentu. Konsep identitas secara umum dapat dimaknai sebagai sebuah citra yang membedakan individu atau suatu kelompok dengan individu atau kelompok lain, hal tersebut dilakukan secara simultan dalam interaksi sosial sampai memunculkan opini tertentu yang berkaitan dengan keberadaan individu atau kelompok tersebut.⁸

Politik identitas sendiri sangat berbeda dengan identitas politik. Identitas politik dipahami sebagai sebuah konstruksi yang menentukan posisi kepentingan subjek dalam suatu ikatan politik. Bagaimana subjek tersebut mampu menampilkan diri dalam segala hal yang mampu

⁷ Cressida Heyes, Identity Politics, Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2007, diakses dari Plato.Stanford.edu/entries/identity_politics h. 64.

⁸ Sri Astuti Buchari, *Kebangkitan Etnis Menuju politik Identitas*, Jakarta: YOI, 2014, h. 27.

membuatnya dipandang menjadi seseorang yang berpengaruh dan bermanfaat bagi semua orang.⁹

Sedangkan politik identitas sendiri dipandang sebagai suatu praktik politik yang berbasiskan identitas kelompok bukan praktik politik yang berbasis kepentingan. Politik identitas ini biasanya muncul bukan karena adanya sistem politik tertentu, tapi karena adanya celah untuk mengekspresikan kebebasan. Selain itu, munculnya politik identitas di Indonesia ini diakibatkan oleh adanya teritorialisasi identitas dengan adanya pembentukan daerah administratif di beberapa wilayah.¹⁰

Politik identitas juga dapat dipahami sebagai suatu dorongan individu untuk memilih calon yang memiliki latar belakang yang sama hal ini disebabkan karena adanya simpati dan solidaritas antara sesama individu dalam suatu etnis. Pemahaman bahwa seseorang individu dapat sejalan dengan mereka yang memiliki keyakinan atau latar belakang yang sama dengan yang mereka miliki sedangkan mereka akan menganggap orang atau kelompok lain yang bertentangan keyakinan atau latar belakang mereka sebagai saingan atau bertentangan musuh yang harus ditaklukkan terminologi ini tidak hanya berlaku dalam bidang politik saja tetapi juga bidang lainnya.¹¹

Politik identitas biasanya digunakan oleh para pemimpin sebagai retorika politik dengan sebutan kami bagi “orang asli” yang menghendaki kekuasaan dan mereka bagi “orang pendatang” yang harus melepaskan kekuasaan. Jadi, singkatnya politik identitas sekedar untuk dijadikan alat memanipulasi alat untuk menggalang politik guna memenuhi kepentingan ekonomi dan politiknya”. Dalam politik identitas tentu saja ikatan kesukuan mendapat

⁹ Richard Parker, “*Five Theses On Identity Politics*”, Harvard Journal of Law & Public Policy Vol. 29, No. 01, 2005, 55.

¹⁰ Purwanto, “*Politik Identitas dan Resolusi Konflik Transformatif*”, Jurnal Review Politik Vol. 05, No. 01, Juni 2015. h. 61-62.

¹¹ Banyamin Molan, *Multikulturalisme Cerdas Membangun Hidup Bersama Yang Stabil dan Dinamis*, (Jakarta: PT. Indeks, 2015),vi

peranan penting, ia menjadi simbol-simbol budaya yang potensial serta menjadi sumber kekuatan untuk aksi-aksi politik.¹²

1. Politik identitas di Indonesia

Istilah politik identitas dalam perkembangannya didefinisikan dalam beragam pengertian yang berbeda, namun merujuk pada spirit perjuangan yang sama. Istilah ini sering dipertukarkan dalam dua terminologi, yaitu *identity politics* atau *politic of identity*. Keduanya merujuk kepada berbagai bentuk mobilisasi politik atas dasar identitas kolektif yang sebelumnya sering disembunyikan (*hidden*), ditekan (*suppressed*), atau diabaikan (*neglected*), baik oleh kelompok dominan yang terdapat dalam sistem demokrasi liberal atau oleh agenda politik kewarganegaraan yang diusung untuk dan atas nama demokrasi yang lebih progresif.

Beberapa di antara istilah penyebutan yang memiliki spirit perjuangan yang sama dengan politik identitas adalah politik perbedaan (*politics of difference*), politik pengakuan (*politics of recognition*), dan politik multikulturalisme (*politics of multiculturalism*).¹³

Tujuan awal dari politik identitas adalah pada dasarnya untuk melawan ketidakadilan. Gerakan perlawanan tersebut mengalami perkembangan dan variasi dalam gerakannya, antara lain *self-determination*, gerakan adat, gerakan lingkungan, gerakan difabel dan berbagai gerakan lainnya. Penggunaan istilah politik identitas kemudian mengalami perluasan, tidak hanya seputar masalah gender, ras feminim, ras, dan kelompok teraniaya,

¹² Muhtar Haboddin, Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal, Jurnal Studi Pemerintahan Vol.3 No.1 Februari 2012

¹³ Laode Machdani Afala, Politik Identitas di Indonesia, UB Press, Malang, 2018. h. 13.

tetapi juga mengarah kepada masalah agama dan ikatan-ikatan kultural beragam.¹⁴

Realitas kemajemukan etnis merupakan realitas sosial yang tidak dapat dielakkan dalam masyarakat. Sebagai realitas sosial, maka keberadaannya tidak dapat dilenyapkan. Oleh karena itu setiap upaya secara sistematis dimaksudkan untuk melenyapkan realitas ini, dengan dalih apapun, termasuk menuju unifikasi masyarakat, cenderung akan menimbulkan keresahan, gejolak sosial, kerusuhan massa, dan disintegritas sosial. Kemajemukan masyarakat (*plures*) tidak dapat dilenyapkan demi jargon persatuan (*unum*), sebab persatuan itu harus dicapai lewat keberadaan pluralitas. Inilah sesungguhnya esensi dari sasanti Bhineka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi dalam satu kesatuan yaitu bangsa Indonesia.¹⁵

Fakta dalam berbagai kasus, unsur kemajemukan agama seringkali dituduh sebagai faktor pemicu atau bahkan penyebab terjadinya konflik sosial dan kekerasan kolektif. Tuduhan ini tentu tidak sepenuhnya salah, karena tidak sedikit kalangan yang menggunakan agama sebagai justifikasi dalam mencapai tujuan dan kepentingan politik. Politisasi agama merupakan hal yang mudah ditemui setiap kali ada kegiatan politik besar, seperti pemilu atau pemilihan ketua partai, bahkan ormas yang berbasis sosial-budaya.

Hal serupa juga terjadi di kalangan internal agama itu sendiri sehingga berdampak pada retaknya hubungan atau terjadinya sekat-sekat pemisah diantara pemeluk satu agama. Sesungguhnya bukan ajaran agama yang menjadi faktor pemicu konflik

¹⁴ Ibid., h. 7-8.

¹⁵ Abdul Asri Harahap, *Manajemen dan Resolusi Konflik Pilkada*, Pustaka Cidesindo, Jakarta, 2005, h. 42.

tetapi lebih disebabkan oleh implementasi oleh penganutnya yang salah dan menyimpang dari tujuan dasarnya. Penyimpangan ini bisa terjadi akibat penafsiran yang salah, baik sengaja atau tidak, atau karena untuk tujuan-tujuan diluar agama.¹⁶

Indonesia adalah sebuah negeri multikultural. Bhineka tunggal ika memuat idealitas multikulturalisme di Indonesia. Dalam kasus tersebut karena penggunaan politik identitas di dalam negeri yang multikultural seperti Indonesia, dapat menciderai hak asasi manusia. yaitu orang atau individu yang memiliki identitas berbasis keagamaan yang berbeda akan dibatasi karena adanya pemisahan antara kelompok agama mayoritas dan agama minoritas dalam proses pemilihan umum tersebut. Dimana karena identitas dalam hal ini agama yang melekat pada individu ia dibatasi dalam haknya untuk memperoleh kesempatan dalam pemerintahan. Hal tersebut termuat dalam pasal 28 D ayat (3) UUD NRI 1945 Indonesia yang berbunyi “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.

Fenomena politik identitas di Indonesia terjadi ketika perhelatan pilkada serentak yang berlangsung awal tahun 2017. Pilkada DKI Jakarta, yang merupakan Ibu Kota Negara menjadi sorotan publik. Bukan hanya karena Jakarta sebagai Ibu Kota Negara saja, melainkan karena meningkatnya isu etnis dan isu keagamaan. Salah satu calon Gubernur petahana DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama Alias Ahok, yang keturunan Tionghoa dianggap telah menistakan agama Islam. Hal tersebut terkait dengan tuduhan telah menyalah artikan makna darisurat Al-Maidah ayat (5) yang berisi tentang kepemimpinan bagi umat muslim. Melalui jejaring media sosial, isu etnis dan

¹⁶ Ibid, h. 44.

penistaan agama ini meluas dan berhasil menyulut gerakan puluhan ribu massa kaum muslim, menuntut agar Ahok diadili. Keberhasilan ini terlihat pada mobilisasi gerakan massa yang dikenal dengan gerakan 411 dan 212. Dalam fenomena tersebut dijadikan oleh sebagian pihak sebagai kekuatan politik untuk memenangkan pilkada DKI Jakarta.¹⁷

Dampak dari fenomena politik identitas yang terjadi di dalam Pilkada DKI Jakarta adalah menguatnya intoleransi antar umat beragama dan antar etnis. Seperti misalnya yang terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT). NTT sering dijuluki sebagai “Nusa Tinggi Toleransi” hal tersebut berdasar pada indeks toleransi kota Setara Institute tahun 2018 untuk 94 kota di Indonesia. Kupang merupakan salah satu dari 10 kota paling “toleran” di Indonesia. Penentuan tersebut berdasarkan pada kriteria-kriteria seperti upaya pemerintah mendorong dan melindungi kebebasan beragama, kesejahteraan gender, inklusi sosial melalui peraturan hukum pemerintah dan kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan toleransi beragama. Politik terjadi di NTT sejak Pemilihan gubernur Jakarta pada tahun 2017, tepatnya setelah mantan gubernur Ahok kalah dan dipenjara atas tuduhan penistaan agama.¹⁸

Sejumlah warga menyalakan lilin di beberapa titik di Kupang sebagai simbol empati terhadap Ahok sebagai saudara mereka yang beragama sama dengan mereka yaitu agama Kristen, dipimpin oleh para pastor Katolik dan pendeta Protestan. Bahkan

¹⁷ Laode Machdani Afala, *Politik Identitas di Indonesia*, UB Press, Malang, 2018, h. 2-3.

¹⁸ Emilianus Yakob Sese Tolo, “Di Bawah Bayang-bayang Ahok: Politik Identitas dalam Pemilu di NTT” <https://tirto.id/di-bawah-bayang-bayang-ahok-politik-identitas-dalam-pemilu-di-ntt-dniM>, 30 April 2019, dikunjungi pada tanggal 14 Agustus 2019.

beberapa warga mengibarkan bendera setengah tiang sebagai tanda protes. Para politisi di NTT pada saat itu sadar betul bahwa politik identitas dapat dijual untuk mendulang suara dari para pemilih yang beragama kristen dan simpatisan Ahok.

Pada saat pemilihan Gubernur di NTT pada tahun 2018 yang lalu calon Gubernur dan Wakil Gubernur ada 4 calon kandidat yang berkontestasi pada proses pemilihan tersebut, Esthon Foenay dan pasangannya Chris Rotok yang pada saat itu didukung oleh partai Gerindra dan PAN, pasangan Benny K. Harman dan Benny A. Litelnoni yang didukung oleh partai Demokrat, PKPI dan PKS, selanjutnya ada pasangan Marinus Sae dan Emmilia Nomleni yang didukung oleh PDI-P dan PKB, kemudian ada pasangan Viktor Bungtilu Laiskodat dan Joshep Nae Soi yang didukung oleh partai NasDem, partai Golkar dan Partai Hanura.¹⁹

Pada saat itu hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) terhadap elektabilitas pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTT menempatkan pasangan calon Esthon Foenay dan Chris Rotom sebagai kandidat yang memiliki keterpilihan paling tinggi, mengungguli tiga pasangan yang lain. Namun pasangan Esthon-Chris kalah telak dalam proses tersebut. Hal tersebut terjadi karena Esthon-Chris yang didukung oleh Partai Gerindra dan PAN dirumorkan sebagai kandidat pendukung khilafah.²⁰

¹⁹ Siritanus Marutho Bere, “KPU Tetapkan 4 Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTT”, <https://regional.kompas.com/read/2018/02/12/10372381/kpu-tetapkan-4-pasangan-calon-gubernur-dan-wakil-gubernur-ntt>, 12 Februari 2018, h. 1, dikunjungi pada 14 Agustus 2019.

²⁰ Emilianus Yakob Sese Tolo, Opt. cit

2. Dasar hukum politik identitas

Fakta dalam berbagai kasus, unsur kemajemukan agama seringkali dituduh sebagai faktor pemicu atau bahkan penyebab terjadinya konflik sosial dan kekerasan kolektif. Tuduhan ini tentu tidak sepenuhnya salah, karena tidak sedikit kalangan yang menggunakan agama sebagai justifikasi dalam mencapai tujuan dan kepentingan politik. Politisasi agama merupakan hal yang mudah ditemui setiap kali ada kegiatan politik besar, seperti pemilu atau pemilihan ketua partai, bahkan ormas yang berbasis sosial-budaya. Hal serupa juga terjadi di kalangan internal agama itu sendiri sehingga berdampak pada retaknya hubungan atau terjadinya sekat-sekat pemisah diantara pemeluk satu agama. Sesungguhnya bukan ajaran agama yang menjadi faktor pemicu konflik tetapi lebih disebabkan oleh implementasi oleh penganutnya yang salah dan menyimpang dari tujuan dasarnya. Penyimpangan ini bisa terjadi akibat penafsiran yang salah, baik sengaja atau tidak, atau karena untuk tujuan-tujuan diluaragama.²¹

Indonesia adalah sebuah negeri multikultural. Bhineka Tunggal Ika memuat idealitas multikulturalisme di Indonesia. Dalam kasus tersebut karena penggunaan politik identitas di dalam negeri yang multikultural seperti Indonesia, dapat menciderai hak asasi manusia. yaitu orang atau individu yang memiliki identitas berbasis keagamaan yang berbeda akan dibatasi karena adanya pemisahan antara kelompok agama mayoritas dan agama minoritas dalam proses pemilihan umum tersebut. Dimana karena identitas dalam hal ini agama yang melekat pada individu ia dibatasi dalam haknya untuk

²¹ Abdul Asri Harahap, Manajemen dan Resolusi Konflik Pilkada, Pustaka Cidesindo, Jakarta, 2005, h. 42.

memperoleh kesempatan dalam pemerintahan. Hal tersebut termuat dalam pasal 28 D ayat (3) UUD NRI 1945 Indonesia yang berbunyi “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.

Memeluk sebuah kepercayaan atau agama dalam pasal 28E ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali”.

Setiap orang warga negara Indonesia berhak atas kehendaknya memeluk agama yang ia yakini, dalam hak beragama juga tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “ Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui secara pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

Hak untuk memeluk agama yang dijelaskan dalam pasal tadi, tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Praktik politik identitas membuat pemeluk agama dibatasi kesempatannya dalam pemerintahan karena identitas yang berbeda. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras,

etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, social, budaya, dan aspek kehidupan lainnya”.

Sesuai yang terkandung dalam Pasal 28 I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah” dalam hal ini negara yaitu pemerintah yang berdaulat, bertanggung jawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia. di dalam kasus politik identitas ini terdapat perbuatan atau perlakuan diskriminatif antara kelompok mayoritas dan minoritas berbasis keagamaan yang membuat terbatas haknya untuk mendapat kesempatan dalam pemerintahan.

Dasar hukum terkait politik identitas ialah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
3. Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Pendapat di Muka Umum
4. Undang-undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Begitupun dengan nilai dalam praktik demokrasi yang selanjutnya, yaitu menekan penggunaan kekerasan seminimal mungkin. Sejatinya, kekerasan merupakan tindakan yang tidak bisa dilepaskan dari manusia, baik mereka yang hidup di negara

demokratis maupun negara non-demokratis. Hanya saja, dalam negara demokrasi, segala tindak kekerasan diredam dan direduksi melalui mekanisme yang ada. Sehingga, daripada melakukan kekerasan yang hanya menghasilkan kepuasan sesaat tanpa adanya jaminan perbaikan untuk kedepannya, negara-negara demokrasi menawarkan koridor hukum sebagai jalur penyelesaian masalah.

3. Politik Identitas di era *post truth*

Post truth atau pasca kebenaran menggambarkan, keadaan di mana fakta objektif kurang berpengaruh dalam membentuk opini dibandingkan daya tarik emosi dan keyakinan personal. Pada 2016, kata ini digunakan hampir sebagian besar dalam hubungannya dengan *referendum* Inggris Raya untuk meninggalkan Uni Eropa dan pilpres AS. Dalam kedua kasus tersebut, fakta faktual, pengetahuan rasional, dan pengecekan tidak berguna apa-apa.

Jurnalisme yang mengutamakan akuntabilitas dengan standar mutu, kode etik dan keterikatan kepada fakta telah berubah atau bahkan dapat dikatakan hilang. Narasi menghilangkan kepercayaan atau kredibilitas. Buruknya, keseluruhan ide tentang kebenaran menjadi kabur bahkan tidak bermakna. Mobilisasi hal-hal bombastis yang tidak didukung oleh data faktual menjadi urusan politisi atau lembaga pemikir (*think-tank*) mereka ketika berkampanye melalui media arus utama (baik cetak, radio, maupun televisi), media online, dan atau media sosial.²²

²² Andrey Miroshnichenko. 2017. "The post-truth world: how social media destroy the absolutism of the "objective" truth", Human as Media, <https://human-as-media.com/2017/02/22/the-posttruth-world-how-social-media-destroy-the-absolutism-of-the-objective-truth/>.

Ciri penting politik pasca-kebenaran adalah:

- (a) Mencampur isu dalam masyarakat dengan hal-hal yang bersifat emosional,
- (b) abai terhadap data dan fakta,
- (c) mengutamakan dan menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya atau palsu,
- (d) menggabungkan gerakan populis dengan teori-teori konspirasi yang jauh dari pembuktian ilmiah,
- (e) mobilisasi narasi fiktif tentang figur atau peristiwa tertentu, dan merekayasa ketidakjujuran dalam membuat opini publik untuk memperkuat posisi sosial figur, kelompok, atau kepentingan tertentu dalam masyarakat yang semakin terbiasa dalam peradaban audio visual dan online.

Secara historis, kondisi pasca kebenaran memang menyisakan perdebatan, khususnya terkait kebenaran itu sendiri. Dalam dunia posmodern, misalnya, kebenaran tidak bisa lagi diukur berdasarkan pendapat pakar atau kelompok tertentu. Kebenaran adalah sesuatu yang bersifat relatif dan subjektif karena kebenaran sebagaimana digambarkan oleh modernisme adalah sesuatu yang sejak kelahirannya bersifat berorientasi kebarat-baratan.²³

Pandangan posmodern adalah hal yang membuka tabir terkait kasus Brexit dan Trump. Grace Russo Bullaro mengatakan bahwa orang-orang yang berada dalam dua faksi politik tersebut lebih suka berbicara dari posisi posmodernis yang berhubungan dengan isu subjektivitas. Makna adalah bahwa mereka memiliki opini mereka sendiri, tanpa memiliki sumber fakta karena mereka tidak percaya

²³ Jenkins, Henry and David Thorburn, ed., (2004), *Democracy and New Media*, Cambridge: MIT Press.

lagi kepada fakta atau kebenaran, selain karena fakta-fakta dan kebenaran-kebenaran versi mereka.

Kebenaran mereka sendiri lebih benar daripada segala hal yang dikabarkan sebagai fakta. Meskipun kebenaran memang bersifat relatif, tetapi mengabaikan kebenaran dengan mengaburkannya dengan fiksi, imajinasi dan narasi emosional menjadi bahaya tersendiri karena hal itu akan menciptakan individu atau kelompok yang mudah sekali disulut untuk membela kepentingan tertentu ketika ada mobilisasi informasi yang menyentuh atau menyulut emosi publik. Padahal mobilisasi tersebut belum tentu tahu dan paham dengan kebenarannya, tetapi biasanya menyinggung identitas atau keyakinan tertentu yang dianut kelompok sasaran kampanye informasi sepihak.²⁴

Pernyataan isu-isu yang sangat sensitif dapat memberikan efek dan dampak yang sangat luar biasa, baik dalam masa kampanye maupun isu-isu politik strategis lainnya. Politik identitas sebagai isu yang dilempar di media sosial, cetak dan media massa dalam setiap kegiatan kampanye pilpres maupun pilkada oleh tim sukses para calon presiden dan kepala daerah sesungguhnya sangat berbahaya. Karena, dapat melahirkan polarisasi massa yang menimbulkan kesulitan dalam melakukan resolusi konflik pasca pemilu.

Era baru teknologi informasi telah memasukkan berbagai aturan baru dalam konteks transformasi sosial budaya, yang secara signifikan berpengaruh pada substansi politik. Informasi dan komunikasi politik pada dasarnya berada dalam ruang lingkup media elektronik dengan berbagai pesan yang

²⁴ Paul Cho. 2017. "Technology and Its Role in the Post-Truth World", <http://www.foxhedgehog.com/2017/03/technology-and-its-role-in-the-post-truth-world/>.

dibawa, hingga interaksi antara media dan penonton mereka disebut sebagai interaksi dua arah. Terdapat hal menarik dalam media elektronik seperti TV, radio, televisi, dan internet yang telah menjadi ruang khusus dalam urusan politik. Hal ini bukan berarti menunjukkan bahwa seluruh urusan politik dapat direduksi menjadi gambar, teks dan suara untuk kemudian dikomunikasikan melalui media, namun tanpa media tidak akan ada kesempatan untuk memenangkan atau mengolah kekuatan.

Kehadiran media, proposal atau kandidat politik tidak memiliki kesempatan untuk memperoleh dukungan secara luas. Politik secara tidak langsung telah terbingkai dalam hal substansi, organisasi, proses dan kepemimpinan, dengan logika yang melekat pada sistem media terutama media elektronik. Proses ini tidak hanya berdampak pada pemilihan umum, namun juga organisasi politik, pengambilan keputusan dan pemerintahan.²⁵

B. Pengaturan Sistem Pemilu di Indonesia

Umumnya negara-negara modern (*modern state*) yang menganut demokrasi konstitusional (negara hukum yang demokratis) dalam konstitusinya mengatur tentang pemilihan umum. Kalau negara tersebut menganut sistem pemerintahan parlementer, maka pemilihan umum yang, diatur dalam konstitusi tersebut adalah untuk memilih wakil-wakil rakyat di lembaga perwakilan, sedangkan apabila negara itu menganut sistem presidensial yang murni, umumnya pemilihan umum tersebut diselenggarakan untuk memilih Presiden (Kepala eksekutif) dan wakil-wakil rakyat pada lembaga perwakilan.²⁶

²⁵ Castells, Manuel, (1997). *“Informational Politics and the Crisis of Democracy”* dalam *The Power of Identity*, Oxford: Blackwell Publisher.

²⁶ Mashudi, pengertian-Pengertian Alendasar Kedudukan Hukum Pemilihan umum di Indonesia Metrul Undang-Undang Dasar 1945, Mandar Maju, Bandung 1993.h 1.

Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim pemilihan umum tidak lain adalah suatu cara untuk memilih wakil-wakil rakyat. Dan karenanya bagi suatu negara yang menyebut dirinya sebagai negara demokrasi, pemilihan umum itu harus dilaksanakan dalam waktu-waktu tertentu. Ataupun seperti yang diungkapkan oleh Bagir Marian bahwa “pemilihan umum yang diadakan dalam siklus lima tahun sekali (5 tahun sekali) merupakan saat atau momentum memperlihatkan secara nyata dan langsung pemerintahan oleh rakyat. Pada saat pemilihan umum itulah semua calon yang ingin duduk sebagai penyelenggara negara dan pemerintahan bergantung sepenuhnya pada kehendak rakyat.”²⁷

1. Pemilihan presiden di Indonesia

Pemilu di Indonesia Tahun 2019 diatur menggunakan satu instrumen hukum karena Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan bersama-sama atau serentak, sehingga dapat dipahami oleh masyarakat.

Partai-partai koalisi pemerintah jika terus solid sampai tahun 2019 untuk mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden maka sudah ada satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Partai-partai oposisi pemerintah juga jika solid maka dapat mengusung satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Adapun PD yang merupakan partai penyeimbang dapat ikut koalisi pendukung pemerintah atau sebaliknya. Keadaan akan menjadi lain jika partai-partai oposisi tidak solid dan pecah maka sudah dapat dipastikan hanya akan ada satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Karena pada pemilihan umum 2014 tidak ada partai yang memperoleh suara 20% atau lebih.

²⁷ Ibid

2. Kode etik pemilihan presiden

Pemilu juga harus memiliki kualitas yang harus dipertanggungjawabkan secara jujur dan adil. Harapan tercapainya Pemilu yang jujur dan adil bisa tercapai apabila setiap pemangku kepentingan seperti peserta Pemilu, pasangan calon dan penyelenggara pemilu dengan meminimalisir terjadinya pelanggaran dan kecurangan yang signifikan, sehingga menerima hasil penyelenggaraan Pilkada. Intinya Pilkada harus dimaknai sebagai jalan menuju perbaikan sebuah daerah dalam periode tertentu. Kongkritnya menurut pendapat D. Rondinelli, tujuan utamanya adalah meningkatkan kemampuan pemerintahan dalam menyediakan barang dan jasa (*public good service*) dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan.²⁸

Mekanisme dan prosedur kerja DKPP merupakan penerjemahan tugas dan wewenang DKPP dalam upaya menegakkan kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara Pemilu. Dasar hukum tugas dan wewenang DKPP adalah (1) Menerima pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu; (2) Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan pemeriksaan pengaduan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu; (3) Menetapkan Putusan; dan (4) Menyampaikan Putusan ke pihak terkait untuk ditindaklanjuti, sedangkan kewenangan DKPP adalah (1) Memanggil penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; (2) Memanggil pelapor, saksi, dan/atau terkait untuk dimintai keterangan/dokumen/bukti lain; dan (3) Memberikan

²⁸ Suharizal. (2012). *Pemilukada, Regulasi, Dinamika dan Konsep Mendatang*. Depok: PT Rajagrafindo Persada h. 136.

sanksi kepada penyelenggara Pemilu apabila terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu.

3. Lembaga pemilihan dan pengawas pilpres

a. KPU

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (disingkat KPU RI) adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. Komisi Pemilihan Umum atau yang dikenal dengan KPU terdiri dari delapan unsur menurut perspektif keadilan bermartabat, yaitu KPU itu sendiri; KPU Provinsi; KPU Kabupaten/ Kota; PPK; PPS; PPLN; KPPS; dan KPPSLN. Sekedar menggunakan perspektif perbandingan historis, pada titik ini terlihat bahwa makna kelembagaan Penyelenggara Pemilu menurut UU-Pemilu (jiwa bangsa/*Volsgeist* Indonesia) sudah jauh lebih kompleks jika dibandingkan dengan kelembagaan Penyelenggara Pemilu pada tahun 1955. Pada waktu itu, dalam konsep kelembagaan Penyelenggara Pemilu hanya dikenal satu Penyelenggara.

Menurut perspektif UU Pemilu atau dalam perspektif Keadilan Bermartabat yang merupakan manifestasi paling konkret dari *Volksgeist* Indonesia juga mengatur tugas dan wewenang serta kewajiban dari KPU sebagai Penyelenggara Pemilu.

Dikemukakan bahwa KPU bertugas merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal. Selain itu, KPU juga bertugas menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN. Begitu pula tugas KPU untuk menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu; mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilu; menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi;

memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.

Tugas di atas, KPU juga bertugas untuk membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan hasil suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta pemilu dan Bawaslu. KPU juga bertugas untuk mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Paslon terpilih serta membuat berita acaranya. Apabila ada Putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu maka KPU bertugas pula untuk menindaklanjuti dengan segera Putusan Bawaslu tersebut.

Selanjutnya KPU bertugas pula menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat. KPU juga melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁹

Lebih jauh dari berbagai kewenangan sebagaimana dikemukakan di atas, KPU juga berwenang untuk menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana Kampanye Pemilu. Tidak hanya sebatas menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana Kampanye Pemilu, KPU juga berwenang untuk mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu; dan melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁰

²⁹ Pasal 12 UU Pemilu.

³⁰ Pasal 13 UU Pemilu.

Menyelenggarakan Pemilu menurut UU Pemilu di dalamnya juga mengandung makna bahwa KPU membentuk Peraturan KPU dan keputusan KPU. Peraturan KPU merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Tidak hanya KPU Pusat, namun KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya, dapat menetapkan keputusan. Penetapan keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota itu berpedoman pada keputusan KPU dan Peraturan KPU. Dalam hal KPU membentuk Peraturan KPU yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan Pemilu, KPU wajib, berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah melalui rapat dengar pendapat, atau yang lasim dikenal dengan RDP.³¹

UU Pemilu mengenal suatu asas hukum yang penting, yaitu bahwa peraturan KPU tidak boleh bertentangan dengan UU Pemilu. Namun demikian, apabila Peraturan KPU diduga bertentangan dengan UU Pemilu, maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Bawaslu dan/atau pihak yang dirugikan atas berlakunya Peraturan KPU berhak menjadi pemohon untuk mengajukan pengujian kepada Mahkamah Agung.

Permohonan pengujian diajukan kepada Mahkamah Agung paling lambat tiga puluh hari kerja sejak Peraturan KPU diundangkan. Mahkamah Agung memutus penyelesaian pengujian Peraturan KPU paling lama tiga puluh hari kerja sejak permohonan diterima oleh Mahkamah Agung. Pengujian Peraturan KPU oleh Mahkamah Agung,

³¹ Pasal 75 UU Pemilu. Hal ini pernah dipersoalkan KPU di Mahkamah Konstitusi, namun dalam UU ini, nampaknya Pembuat UU masih mencantumkan kembali prinsip ini sebagai suatu kebenaran yang tidak dapat diganggu-gugat. Nampaknya, masih dibenarkan di Republik ini, pelajaran elementer di Fakultas Hukum, yang mengenal asas yang penting yang harus diingat semua Sarjana Hukum, yaitu bahwa UndangUndang tidak dapat diganggu-gugat.

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengujian atas PKPU ini pernah dilakukan Mahkamah Agung atas PKPU No. 20 Tahun 2018 yang melarang mantan narapidana Korupsi untuk menjadi calon legislatif. Isi Putusan MA menyatakan bahwa ketentuan itu bertentangan dengan UU-Pemilu. Konsekuensi yuridis dari Putusan MA itu, mantan narapidana korupsi diperbolehkan untuk mencalonkan diri sebagai caleg.

b. BAWASLU

Selain Komisi Pemilihan Umum, UU Pemilu sebagai manifestasi dari jiwa bangsa (*Volksgeist*) dalam perspektif keadilan bermartabat juga berisi suatu rumusan yang mengatur kelembagaan Penyelenggara Pemilu lainnya. Kelembagaan Penyelenggara Pemilu tersebut lainnya tersebut adalah Badan Pengawas Pemilu, yang dikenal dengan Bawaslu. Badan Pengawas Pemilu itu bersama dengan KPU dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), ketiganya telah ditetapkan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.³²

Telah diatur dalam Bab II, Bagian Kesatu Umum UUPemilu, bahwa pengawasan penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu. Lembaga ini yang terdiri atas Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan; Panwaslu Kelurahan/Desa; Panwaslu LN; dan Pengawas TPS. Bawaslu berkedudukan di ibu kota negara. Bawaslu Provinsi, berkedudukan di ibu kota provinsi. Bawaslu Kabupaten/Kota,

³² Pasal 1 angka (7) UU Pemilu.

berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota. Panwaslu Kecamatan, Panwaslu berkedudukan di kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, berkedudukan di kelurahan/desa. Panwaslu LN berkedudukan di kantor perwakilan Republik Indonesia. Pengawas TPS berkedudukan di setiap TPS.

Susunan lembaga-lembaga pengawas penyelenggaraan Pemilu tersebut bersifat hierarkis. Sifat yang sama, yaitu hierarkis juga dimiliki Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap. Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS bersifat *ad hoc*.³³

Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN dibentuk paling lambat satu bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat dua bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu selesai. Pengawas TPS dibentuk paling lambat dua puluh tiga hari sebelum hari pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat tujuh hari setelah hari pemungutan suara.³⁴

Keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota terdiri atas individu yang memiliki tugas pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Jumlah anggota Bawaslu sebanyak lima orang; Bawaslu Provinsi sebanyak lima atau tujuh orang; Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak tiga atau lima orang; dan Panwaslu Kecamatan sebanyak tiga orang.

Jumlah anggota Panwaslu Kelurahan/Desa di setiap kelurahan/desa sebanyak satu orang. Jumlah

³³ Pasal 89 UU Pemilu.

³⁴ Pasal 90 UU Pemilu.

anggota Panwaslu LN adalah tiga orang. Pengawas TPS berjumlah satu orang setiap TPS. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota. Ketua Bawaslu dipilih dari dan oleh anggota Bawaslu. Ketua Bawaslu Provinsi, ketua Bawaslu Kabupaten/Kota, ketua Panwaslu Kecamatan, dan ketua Panwaslu LN dipilih dari dan oleh anggota.³⁵

Tugas-tugas Bawaslu yang dilakukan dalam konteks pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu adalah mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu; mengoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu; berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait; dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.

Untuk tugas-tugas yang berkenaan dengan usaha melakukan penindakan pelanggaran Pemilu, Bawaslu menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu; menginvestigasi dugaan pelanggaran Pemilu; menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu; serta memutus pelanggaran administrasi Pemilu.

Sedangkan penindakan terhadap sengketa proses Pemilu dilakukan Bawaslu melalui tugas-tugas menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa; melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu

³⁵ Tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang Pemilu

dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu. Selain tugas-tugas di atas, Bawaslu juga memiliki sejumlah kewenangan sebagai berikut.³⁶

Bawaslu berwenang: menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengahrr mengenai Pemilu; memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu; memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang; menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu; Bawaslu juga mempunyai beberapa kewenangan.

Adapun kewenangan Bawaslu menurut UU Pemilu, yaitu merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas ASN, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia. Bawaslu berwenang pula untuk mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang.

Kewenangan itu dijalankan apabila Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain kewenangan di atas, Bawaslu juga berwenang meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu.

Bawaslu berwenang pula mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu

³⁶ Pasal 94 UU Pemilu.

Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bawaslu berwenang membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN; mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu berwenang membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN; mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Bawaslu memiliki sejumlah kewajiban yuridis sebagaimana dikemukakan di bawah ini.

Bawaslu berkewajiban untuk bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan. Disamping itu, Bawaslu berkewajiban menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan.

Beberapa kewajiban Bawaslu lainnya, yaitu melakukan pengawasan terhadap pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU. Pengawasan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih itu dilakukan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bawaslu

juga melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁷

c. DKPP

Setelah pemaparan KPU dan Bawaslu, yaitu dua unsur penting; unsur pertama dengan penekanan para pelayanan, dan unsur kedua dengan penekanan pada pengawasan dalam kelembagaan Penyelenggara Pemilu.³⁸ Dalam hal dikemukakan suatu deskripsi tentang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Lembaga ini bertugas menangani pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu. DKPP adalah faktor penting dalam kelembagaan Penyelenggara Pemilu menurut UU-Pemilu dalam perspektif Keadilan Bermartabat. DKPP berkiprah pada aspek pengawalan nilai-nilai untuk pemurnian kelembagaan Penyelenggara Pemilu. Bersama KPU dan Bawaslu, DKPP berkontribusi menguatkan dalil bahwa Pemilu bermartabat juga bergantung pada kelembagaan Penyelenggara Pemilu yang bermartabat.³⁹

Sebagaimana dikemukakan di atas DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. Lembaga ini menyelenggarakan peradilan etis bagi Penyelenggara Pemilu menurut jiwa bangsa (Volksgeist), menurut hukum yang berlaku. Dalam perspektif teori keadilan bermartabat (*the Dignified Justice Theory*), keinginan dalam jiwa bangsa yang demikian itu memanifestasikan diri secara konkret dalam UU Pemilu.

³⁷ Pasal 96 UU Pemilu.

³⁸ Pasal 1 angka (24) UU-Pemilu.

³⁹ Hakikatnya, UU-Pemilu sebagai manifestasi paling konkret dari jiwa bangsa (Volksgeist) dalam bidang Pemilu di Indonesia tidak hanya mengatur mengenai kelembagaan penyelenggara Pemilu saja, UU-Pemilu juga mengatur mengenai kelembagaan pelaksanaan pemilu, kelembagaan pelanggaran Pemilu dan kelembagaan sengketa Pemilu, serta kelembagaan tindak pidana pemilu.

Suatu postulat penting yang dianut adalah bahwa hukum, termasuk hukum mengenai Pemilu dan lebih khusus lagi hukum yang mengatur tentang kelembagaan Penyelenggara Pemilu hanya dapat ditemukan dalam jiwa bangsa (*Volksgeist*). Dengan perkataan lain hukum mengenai kelembagaan Penyelenggara Pemilu tidak merujuk kepada pandangan teori Barat misalnya. Sumber rujukan dalam membangun pengertian mengenai kelembagaan Penyelenggara Pemilu, diprioritaskan pada undang-undang (UU Pemilu).

Pembentukan DKPP paling lama dua bulan sejak anggota KPU dan anggota Bawaslu mengucapkan sumpah/janji. Lembaga ini beranggotakan tujuh orang. Ketujuh orang itu terdiri atas satu orang *ex officio* dari unsur KPU; satu orang *ex officio* dari unsur Bawaslu; dan lima orang tokoh masyarakat. Anggota DKPP yang berasal dari tokoh masyarakat diusulkan oleh Presiden sebanyak dua orang. Sedangkan yang diusulkan oleh DPR sebanyak tiga orang.

Usul keanggotaan DKPP dari setiap unsur diajukan kepada Presiden.⁴⁰ Susunan DKPP terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan enam orang anggota. Ketua DKPP dipilih dari dan oleh anggota DKPP melalui rapat pemilihan Ketua DKPP yang dipimpin oleh anggota yang tertua dan termuda. Tenancy, atau masa tugas keanggotaan DKPP adalah lima tahun dan berakhir pada saat dilantiknya anggota DKPP yang baru.

Setiap anggota DKPP dari setiap unsur dapat diganti antar waktu. Pengangkatan anggota DKPP yang bukan dari unsur KPU dan Bawaslu ditetapkan dengan Keputusan Presiden.⁴¹ DKPP menyusun dan

⁴⁰ Pasal 155 UU Pemilu.

⁴¹ Pasal 156 UU Pemilu.

menetapkan kode etik untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas anggota dari lembaga-lembaga yang menyelenggarakan Pemilu atau disebut dengan kelembagaan Penyelenggara Pemilu. Mereka adalah: (1) anggota dari KPU, (2) anggota dari KPU Provinsi, (3) anggota KPU Kabupaten/Kota, (4) anggota PPK, (5) anggota PPS, (6) anggota KPPS, (7) anggota PPLN, (8) anggota KPPSLN serta (9) anggota Bawaslu, (10) anggota Bawaslu Provinsi, (11) anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, (12) anggota Panwaslu Kecamatan, (13) anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, (14) anggota Panwaslu LN, dan (15) anggota Pengawas TPS.

Untuk melakukan pemeriksaan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh, KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.⁴² DKPP menyelenggarakan sidang. Dalam rangka menjaga prinsip imparialitas dalam peradilan etis menurut hukum itu maka apabila ada anggota DKPP yang berasal dari anggota KPU atau Bawaslu diadukan karena diduga melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, anggota yang bersangkutan tidak dapat menjadi majelis etik DKPP untuk pelanggaran yang diadukan tersebut.⁴³

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu bertugas menerima aduan dan/atau laporan dugaan

⁴² Dari rumusan ketentuan ini dapat timbul kesan bahwa sidang yang dilakukan DKPP hanya terbatas untuk melakukan pemeriksaan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/ Kota. Padahal, Kode Etik yang disusun DKPP Kode etik yang dikemukakan di atas bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh anggota KPU, KPU Provinsi; KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN, serta anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS

⁴³ Pasal 158 UU Pemilu.

adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. DKPP juga bertugas melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu. Tugas seperti itu berbeda dengan yang terjadi dalam sistem peradilan pidana misalnya. Dalam sistem peradilan pidana penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dilakukan oleh badan-badan terpisah.

Pentahapan jalannya peradilan etis menurut hukum terhadap Penyelenggara Pemilu semuanya, yaitu tahap-tahap penyelidikan dan verifikasi serta pemeriksaan dan akhirnya penjatuhan Putusan dilakukan oleh satu institusi, yaitu DKPP. Pelaksanaan Putusan DKPP sebagai peradilan *ethics* menurut hukum dapat dipaksakan, dan karena itu pada bagian kepala Putusan DKPP harus mengikuti prinsip dasar Putusan pengadilan pada umumnya, terdapat *irah-irah*. Dalam hal ini dipilih *irah-irah*: Demi Keadilan Dan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.⁴⁴ Pelaksanaan Putusan DKPP dalam kewajibannya memberikan keadilan diberi bentuk “tindak lanjut” Putusan DKPP menjadi wewenang pihak terkait. Dimaksud dengan “pihak terkait”,

⁴⁴ Setiap putusan pengadilan, termasuk peradilan yang dijalankan DKPP untuk mengawal pemurnian nilai-nilai kelembagaan Penyelenggara Pemilu harus mempunyai kepala Putusan pada bagian atas Putusan, yaitu *irah-irah*: Demi Keadilan dan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Kepala Putusan menandai adanya kewibawaan yang memberi kekuatan eksekutorial pada Putusan. Apabila kepala putusan tidak dibubuhkan pada suatu putusan pengadilan, sekalipun ada yang mengatakan quasi pengadilan namun tetap saja sama baiknya dengan putusan pengadilan, maka hakim tidak dapat melaksanakan Putusan tersebut; atau lembaga yang ditunjuk untuk menindaklanjuti dan mengawasi Putusan tersebut tidak dapat melakukan perbuatan hukum lebih lanjut. Pandangan seperti ini merupakan prinsip hukum yang diakui dalam peraturan perundangan yang berlaku dalam Sistem Hukum Pancasila. Lihat misalnya Pasal 224 HIR, dan Pasal 258 Rbg.

antara lain pihak yang diadukan, kepolisian dalam hal pelanggaran pidana, dan Penyelenggara Pemilu.⁴⁵

Sebagai suatu peradilan *ethics* menurut hukum DKPP diberikan kewenangan oleh UU Pemilu untuk memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik. Tujuan pemanggilan adalah untuk memberikan penjelasan dan pembelaan. DKPP juga berwenang memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk, untuk dimintai dokumen atau bukti lain; menjatuhkan sanksi kepada penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan memutus pelanggaran kode etik. Merupakan bagian dari tugasnya, DKPP juga dapat membentuk tim pemeriksadaerah (TPD), di setiap provinsi yang bersifat *ad hoc*. TPD masingmasing berjumlah empat orang. Ketetapan mengenai tugas, fungsi, wewenang, dan tata kerja tim pemeriksa daerah diatur dengan Peraturan DKPP.⁴⁶

C. **Politik identitas dalam Islam**

Politik identitas Islam keterkaitan pemimpin umat Islam pada bertumpuh pada keadilan, tersamaan, kehormatan, Toleransi, kemerdekaan, serta perilaku moral yang baik (Al Akhlak Karimah). Turut mewarnai dalam dinamika memobilisasi umat Islam, sebagai mayoritas, dan tanpa mengesampingkan agama yang lain. Tentu ini akan sangat mencederai yang selama ini dipegang dengan nilainya keadilan sosial dan persatuan umat.

Dunia yang semakin mengglobal menciptakan keterkaitan, dan ketergantungan satu dengan yang lain

⁴⁵ Penjelasan Pasal 159 ayat (3) huruf (d) UU Pemilu.

⁴⁶ Pasal 164 UU Pemilu. Penulis dapat memerkirakan, meskipun ini hanya pendapat pribadi dan tidak mewakili pandangan DKPP sebagai suatu institusi, TPD tersebut akan diberikan tugas untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang bersifat pra penyelidikan dan pra verifikasi terhadap laporan-laporan yang masuk ke DKPP.

semakin kuat, namun kenyataannya di masyarakat kesenjangan semakin menganga, baik antar individu maupun kelompok atau Negara. Lahirnya politik identitas tak terlepas dari dua factor yaitu kesenjangan sosial dan benturan kebudayaan. Inilah diantara pemicu munculnya politik identitas. Dalam konteks ke Indonesiaan Politik Identitas menyebar karena, kesenjangan sosial, lemahnya literasi, buruknya kelembagaan politik, polarisasi politik yang tidak merata.

Politik identitas sesungguhnya bertentangan dengan ajaran Islam dan merusak sendi-sendi kehidupan bernegara bahkan bertentangan dengan nilai kemanusiaan, dan keadilan. Islam menginginkan terciptanya sebuah tatanan masyarakat yang aman, sejahtera, makmur dan bahagia, oleh sebab itu perangkat yang dibutuhkan dalam menjalankannya adalah: keadilan, kebersamaan, kesamaan, dan musyawarah merupakan instrument yang wajib ada dalam sistem pemerintahan suatu negara dalam bentuk apapun.

1. Sejarah politik identitas dalam Islam

Beberapa tahun belakangan ini, Indonesia diwarnai oleh gelombang politik identitas yang begitu besar. Identitas menjadi sorotan besar dalam panggung politik di Indonesia. Identitas yang banyak digunakan dalam pertarungan politik adalah identitas Islam. Tidak heran memang jika identitas Islam banyak digunakan, karena suara mayoritas pemilih di Indonesia pemeluk agama Islam. Gelombang besar politik identitas Islam ini muncul berawal dari demonstrasi umat Islam terhadap salah satu calon gubernur Jakarta pada tahun 2016 tentang masalah penistaan agama.

Adanya opini publik yang besar tentang keharusan muslim memilih pemimpin muslim menjadi kegaduhan dan pro-kontra di kalangan masyarakat. Selain itu, masyarakat pun kemudian

terpolarisasi, antara pendukung “penista agama” dan yang tidak. Banyak kalangan menilai bahwa Indonesia sedang mengalami suatu potensi konflik yang sebenarnya sudah lama diperdebatkan, yaitu relasi antara agama dan negara. Dapat ditelusuri misalnya, relasi antara agama dan negara pernah diperdebatkan oleh Soekarno dan Muhammad Natsir. Keduanya pada saat itu berdebat tentang negara Republik Turki, Mustafa Kemal Atatürk sebagai kiblat Soekarno dan dianggap salah oleh Muhammad natsir karena telah memisahkan agama dan Negara (Sari, 2016, p. 146).

Fernandes mengatakan bahwa efek dari politik identitas pada pilkada Jakarta tahun 2016 lebih mempengaruhi elite politik daripada pemilihnya. Sebagai contoh, keputusan dipilihnya K.H Ma'ruf Amin dan pembatalan Mahfud MD merupakan strategi untuk menggaet suara pemilih muslim. Demikian pula dengan lawannya, Prabowo yang juga mengakomodir kepentingan para elit politik muslim dengan bergabung dalam beberapa kali ijtima ulama (Fernandes, n.d., p. 6), jika melihat peristiwa tersebut, politik identitas memang diminati oleh elite politik di Indonesia, terlebih agama, “alat” jitu untuk meraup suara pemilih. Kopko menyebutkan bahwa agama memang memiliki efek terhadap keikutsertaan politik. Ia memberikan contoh dengan ajaran Gereja Mennonite. Gereja melarang aktivitas politik, karena bersifat keduniawian, dan hasilnya pun berefek pada rendahnya pemilih politik Gereja rendah (Saputro, 2018, p. 116), jika terus-menerus politik identitas digunakan oleh para elite politik, maka bagaimana kemudian pengaruhnya terhadap demokrasi di

Indonesia, terlebih Indonesia masih dalam proses belajar berdemokrasi.⁴⁷

2. Dasar hukum politik identitas dalam Islam

Dasar-dasar yang dijadikan landasan para ulama didalam *siyasah dauliyah* dan dijadikan ukuran apakah *siyasah dauliyah* berjalan sesuai dengan semangat Al-Islam atau tidak, adalah:

2.1. Kesatuan Umat Manusia

Meskipun manusia ini berbeda suku berbangsa-bangsa, berbeda warna kulit, berbeda tanah air bahkan berbeda agama, akan tetapi merupakan satu kesatuan manusia karena sama-sama makhluk Allah, sama bertempat tinggal di muka bumi sama-sama mengharapkan kehidupan yang bahagia dan damai dan sama-sama dari Adam. Dengan demikian maka perbedaan-perbedaan diantara manusia harus disikapi dengan pikiran yang positif untuk saling memberikan kelebihan masing-masing dan saling menutupi kekurangan masing-masing. Al-Qur'an banyak mengisyaratkan kesatuan manusia ini, antara lain dinyatakan:

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً

(QS. al-Baqarah: 213)

"Manusia adalah umat yang satu"

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰكُمْ

(QS. al-Hujurat: 13)

"Wahai manusia kami telah menciptakan kamu sekalian dari laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya

⁴⁷ Fernandes, A. (n.d.). Politik Identitas dalam Pemilu 2019: Proyeksi dan Efektivitas. h. 11.

kamu saling kenal-mengenal, sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa diantara kamu."

Sedangkan yang menunjukkan adanya perbedaan di antara manusia adalah:

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَخَلْقُ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ
لَوْ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

(QS. ar-Rum: 22)

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah menciptakan langit dan bumi dan berbeda-beda bahasa dan warna kulitmu, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui."

Untuk menetralsir dampak negatif dari kemajemukan kepentingan budaya manusia supaya tidak berkembang menjadi ancaman bagi persatuan dan kesatuan manusia di satu sisi dan di sisi lain memperkuat dan menghargai *ukhuwah insaniyah* (persaudaraan manusia), maka muncul dasar keadilan, persamaan, kemanusiaan, toleransi, kerja sama, kemerdekaan, dan perilaku moral yang baik.

2.2. Al'Adalah (Keadilan)

Didalam *Siayah Dauliyah*, hidup berdampingan dengan damai baru terlaksana apabila didasarkan kepada keadilan baik diantara manusia maupun diantara berbagai negara, bahkan perang pun terjadi karena salah satu pihak merasa diperlakukan dengan tidak adil. Oleh karena itu, ajaran Islam mewajibkan penegakkan keadilan baik terhadap diri sendiri, keluarga, tetang, bahkan terhadap musuh sekalipun

kita wajib bertindak adil. Banyak ayat-ayat yang berbicara tentang keadilan antara lain:

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ۤأَلَّا تَعْدِلُوْا ۖ اِعْدِلُوْا ۚ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى

(QS. al-Maidah: 8)

“Dan janganlah sekali-kali kebencian terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku karena berlaku adil itu lebih dekat kepada takwa.”

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِاَلْقِسْطِ ۚ سُهْدَآءَ لِّلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰۤ اَنْفُسِكُمْ اَوْ اِلْوٰى لِدِيْنَ ۚ وَ لَا فَرِيْنَ

(QS. an-Nisa: 135)

“Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu orang-orang yang menegakkan keadilan, menjadi saksi bagi Allah walaupun terhadap dirimu sendiri, terhadap ibu bapakmu, atau terhadap kaum kerabatmu.”

Hal ini mengisyaratkan agar kebencian dan kecintaan yang berlebihan tidak menyebabkan ketidakadilan,

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ ۚ وَ اِيْتَاٰى ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ

(QS. an-Nahl: 90)

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan.”

2.3. Al-Musawah (Persamaan)

Manusia memiliki hak-hak kemanusiaan yang sama, untuk mewujudkan keadilan adalah mutlak mempersamakan manusia dihadapan hukum. Kerjasama internasional sulit dilaksanakan apabila tidakdi dalam kesederajatan antar negara dan antar bangsa. Demikian pula setiap manusia adalah subjek hukum, penanggung hak dan kewajiban yang sama. Semsngst dari AL-Qur'an dan Hadis Nabi serta perilaku para sahabatyang membebaskan budak adalah untuk mewujudkan persamaan kemanusiaan ini. Karena perbudakan menunjukkan adanya ketidaksederajatan manusia. Uraian tentang perbudakan yang tidak dikehendakioleh Islam dengan baikantara lain ditulis oleh Amir Ali.⁴⁸ Hak hidup dan hak memiliki dan kehormatan kemanusiaan harus sama-sama dihormati dan dilindungi, satu-satunya ukuran kelebihan manusia terhadap manusia lainnya adalah ketakwaannya.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ

(QS. al-Hujurat: 13)

"Dalam ibadah haji di padang arafah adalah symbol persamaan manusia dihadapan Allah SWT. Persamaan kemanusiaan ini diisyaratkan dalam Al-Qur'an."

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأَ
وَلَيْكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

(QS. An-Nisa' 4: Ayat 124)

"Dan barangsiapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan sedang dia beriman,

⁴⁸ Amir Ali, *The Spirit...*, h. 128-133.

maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun.”

فَاَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّي لَا اُضِيعُ عَمَلَ عَا مِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ
ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى ۚ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ

(QS. Ali 'Imran 3: Ayat 195)

“Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sebagai pahala dari Allah. Dan di sisi Allah ada pahala yang baik.”

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ
حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا
يَعْمَلُوْنَ

(QS. An-Nahl 16: Ayat 97)

“Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

Adapun perbedaan-perbedaan diantara manusia adalah perbedaan tugas posisi dan fungsi masing-masing di dalam kiprah kehidupan manusia di dunia ini, bisa disimpulkan bahwa *Al-ashlu fi al-Insaniyah*

al-Musawah, yang berarti “hukum asal di dalam kemanusiaan adalah sama”.

2.4. *Karomah Insaniyah* (Kehormatan Manusia)

Karena kehormatan manusia inilah, maka manusia tidak boleh merendahkan manusia lainnya dan suatu kaum tidak boleh menghina kaum lainnya. Kehormatan kemanusiaan ini berkembang menjadi kehormatan terhadap suatu kaum dan komunitas dan bisa dikembangkan menjadi suatu kehormatan suatu bangsa atau negara. Kerja sama internasional tidak mungkin dikembangkan tanpa landasan saling hormat-menghormati. Kehormatan kemanusiaan inilah pada gilirannya menumbuhkan harga diri yang wajar baik pada individu maupun pada komunitas, muslim ataupun nonmuslim tanpa harus jatuh kepada kesombongan individual atau nasionalisme yang ekstrem. Banyak ayat Al-Qur'an dan Hadis tentang hal ini diantaranya:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ

(QS. al-Isra: 70)

“Sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam (manusia).”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا
خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا
مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِهَا لَا لِقَابٍ

(QS. Hujurat: 11)

“Wahai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, bisa jadi yang diolok-olok lebih baik dari yang mengolok-olok, dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita lain bisa jadi wanita yang diolok-olok lebih baik dari

wanita yang mengolok-olok, dan janganlah kamu mencela dirimu sendiridan janganlah kamu panggil memanggil dengan sebutan yang buruk.”

Ayat diatas menunjukkan bahwa mencela dan merendahkan manusia lain sama dengan mencela dan merendahkan diri sendiri. Di dalam suatu hadis, diceritakan bahwa Ketika Rasulullah duduk-duduk bersama sahabat, kemudian lewat orang mengusung jenazah orang Yahudi. Rasulullah berdiri. Seorang sahabat berkata: *“I yaitu yang diusung jenazah orang Yahudi, maka berkata Rasulullah bukankah ia itu manusia.”* (Hadis Riwayat Bukhari & Muslim)

2.5. Tasamuh (Toleransi)

Dasar ini tidak mengandung arti harus menyerah kepada kejahatan atau memberi peluang kepada kejahatan. Allah mewajibkan menolak permusuhan dengan Tindakan yang lebih baik, penolakan dengan yang lebih baik ini akan menimbulkan persahabatan bila dilakukan pada tempatnya setidaknya akan menetralsisir ketegangan.

وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ

(QS. Fussilat: 34)

“Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia.”

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

(QS. al-Araf: 199)

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.”

Sifat pemaaf merupakan sesuatu yang sangat terpuji dan sebaliknya sifat dendam merupakan suatu sifat yang tercela, pemaaf yang baik adalah pemaaf disertai dengan harga diri yang wajar dan bukan pemaaf dalam arti menyerah atau merendahkan diri terhadap kejahatan-kejahatan.

Kehidupan ini tidak bisa dikembangkan atas dasar dendam, kebencian dan paksaan; kehidupan bersama bisa dibina dan dikembangkan atas dasar pemaaf, kasih sayang dan dialog. Hal semacam ini telah dipraktikkan oleh Nabi antara lain pada waktu membebaskan kota Makkah terhadap penduduk Makkah; Nabi berkata: *“Pada hari ini, tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, pergilah, kamu semua bebas.”* Tasamuh adalah Islam adalah toleransi yang berangkat dari ajaran agamanya, bukan tasamuh karena kebutuhan temporal atau untuk kepentingan sesaat.⁴⁹

2.6. Kerja Sama Kemanusiaan

Kerja sama kemanusiaan ini adalah realisasi dari dasar-dasar yang telah dikemukakan di atas, kerja sama disini adalah kerja sama di setiap wilayah dan lingkungan kemanusiaan, kerja sama ini diperlukan karena ada saling ketergantungan baik antar individu ataupun antara negara di dunia ini. Sudah barang tentu kerja sama ini dilaksanakan agar saling menguntungkan dalam suasana baik dan untuk

⁴⁹ Lihat pula QS. Surat al-Baqarah: 62 dan Ali Imran: 199.

kebaikan bersama, bukan kerja sama untuk saling bermusuhan dan berbuat kejahatan.⁵⁰

Allah akan memberi kekuatan kepada orang yang mau menolong kepada sesama manusia dimana saja. Nabi bersabda: “*Allah akan selalu menolong hamba-Nya selama hamba-Nya menolong saudaranya.*” Hadis ini mengisyaratkan nilai kemanusiaan yang sangat tinggi, dari hadis ini juga tercermin adanya *ukhuwah insaniyah*. Kesadaran akan perlunya kerja sama dan tolong-menolong dalam segala bentuk dan cara yang disepakati yang baik, akan menghilangkan nafsu permusuhan, dan saling berebut hidup. Kehidupan individu dan antar bangsa akan harmonis apabila didasarkan pada kerja sama, bukan kepada saling menghancurkan yang satu terhadap yang lain.

2.7. Kebebasan, Kemerdekaan/*Al-Huriyah*

Kemerdekaan sesungguhnya dimulai dari pembebasan diri dari pengaruh hawa nafsu serta mengendalikannya di bawah bimbingan keimanan dan akal sehat. Dengan demikian, kebebasan bukanlah kebebasan mutlak, akan tetapi kebebasan yang bertanggung jawab terhadap Allah, terhadap keselamatan dan kemaslahatan hidup manusia di muka bumi, kebebasan ini bisa dirinci lebih jauh seperti:

- a) *Kebebasan berfikir*. Agar manusia terbebas dari keraguan dan *taqlid* buta bahkan Islam mendorong untuk bebas memikirkan tentang alam semesta, tentang dirinya, tentang apa yang dilihat dan apa yang didengar.⁵¹

⁵⁰ QS. al-Maidah: 2.

⁵¹ QS. ar-Rum: 8, al-Imran: 7, al-Baqarah: 170, al-Hajj: 16, al-A'raf: 179.

Kebebasan berfikir inilah yang membawa umat Islam kepada keunggulan budaya keilmuan masa lampau.

- b) *Kebebasan beragama*. Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk menganut agama yang dia kehendaki dan tidak seorangpun bisa memaksa baik dengan kekerasan ataupun cara halus untuk berpindah agama, tidak ada paksaan di dalam agama.

أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ
(QS. Yunus: 99)

“Maka, apakah engkau memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang beriman seluruhnya.”

- c) *Kebebasan menyatakan pendapat*. Kebebasan menyatakan pendapat ini di dalam hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal *al-akhlaq al-karimah* dan kemaslahatan umum dan dalam rangka *amar ma'ruf nahi munkar* menjadi wajib.⁵² Akan tetapi manusia tidak bebas menyatakan pendapat yang bersifat permusuhan, penghinaan, dan penghujatan tanpa bukti yang meyakinkan.⁵³
- d) *Kebebasan menuntut ilmu*. Kebebasan ini sesungguhnya adalah akibat dari kebebasan berfikir. Bahkan, menuntut ilmu menjadi suatu kewajiban dalam keadaan tertentu yaitu apabila berkaitan dengan ilmu-ilmu yang diistilahkan dengan *fardhu ain*. Sedangkan ilmu yang dikategorikan dengan *fardhu kifayah*, yaitu ilmu untuk kemaslahatan masyarakat dan ilmu kategori kedua ini banyak macamnya dan terus

⁵² QS. al-Imran: 104.

⁵³ QS. an-Nisa: 148; al-An'am: 108.

berkembang. Di sinilah letaknya kebebasan memilih ilmu yang dipelajari sesuai dengan profesi, yang penting ilmu yang dipelajari itu adalah bermanfaat bagi dirinya dan masyarakatnya.

- e) *Kebebasan memiliki harta*. Baik benda tetap maupun benda bergerak dalam batas-batas benda yang boleh dimiliki sesuai dengan Syariah seperti telah dijelaskan di dalam *fiqh siyasaḥ Maliyah*.

2.8. Perilaku Moral yang Baik (*Al-Akhlak al-Karimah*)

Perilaku yang baik merupakan dasar moral di dalam hubungan antara manusia, antara umat dan antara bangsa di dunia ini, selain itu prinsip inipun diterapkan terhadap seluruh makhluk Allah di muka bumi, termasuk flora dan fauna, alam nabati, dan alam hewani; budi baik ini tercermin antara lain di dalam kasih sayang seperti ditegaskan di dalam Hadis Nabi:

السَّمَاءُ فِي مَنْ يَرْحَمُكَ الْأَرْضُ فِي مَنْ أَرْحَمُوا

(HR. Abu Daud dan At-Turmudzi)

“Kasih sayangilah yang dibumi, Allah SWT. akan menyayangimu.”⁵⁴

Memiliki kepedulian terhadap orang-orang yang lemah, termasuk bangsa yang lemah dan miskin.

Serta mau menepati janji. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

(QS. al-Maidah: 1)

⁵⁴ HR. Abu Daud dan At-Turmudzi

"Wahai orang-orang beriman tepatilah perjanjian-perjanjianmu".

وَأَوْفُوا بِأَعْهَدِكُمْ ۚ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

(QS. al-Isra: 34)

"Tepatilah janji sesungguhnya janji itu diminta tanggung jawab".

Seperti yang telah dikemukakan bahwa salah satu sumber hubungan internasional itu adalah perjanjian antar bangsa. Bahkan organisasi internasional terbentuk karena adanya perjanjian, Nabi sendiri telah melakukan perjanjian antara lain yang sangat terkenal adalah Perjanjian Hudaibiyah. Dalam kaitan inilah, maka menepati janji menjadi sangat penting. Apabila perjanjian telah dibuat dan disahkan (diratifikasi) kemudian tidak ditepati, maka kepercayaan akan hilang. Dan apabila sudah terjadi krisis kepercayaan, maka malapetaka akan muncul. Karena sangat sulit mengembalikan kepercayaan yang telah hilang, hal ini banyak dialami oleh banyak negara di dunia sampai sekarang.

Inilah dasar-dasar *siyasah* di dalam hubungan internasional atau *siyasah dauliyah*, dasar-dasar tersebut semuanya mengacu kepada manusia sebagai satu kesatuan umat manusia, atau dengan kata lain dasar-dasar tersebut dalam rangka *hifdzu al-Ummah* dalam ruang lingkupnya yang paling luas yaitu seluruh manusia yang diikat oleh rasa *ukhuwah insaniyah* disamping umat dalam arti komunitas agama baik muslim maupun nonmuslim. Untuk komunitas muslim diikat oleh *ukhuwah Islamiyah*, sedangkan akar dari umat dalam arti komunitas adalah keluarga sakinah. Yang membentuk keluarga sakinah adalah pribadi-pribadi muslim yang *mud'mainah*. Jadi, kalau diartikan dari bawah sebagai berikut idealnya: pribadi-pribadi yang *mud'mainah* membentuk rumah tangga yang sakinah dari rumah tangga yang *sakinah* terbentuk *umatan wahidah* dari *umah wahidah*

terbentuk *baldah thoyibah*, dari *baldah thoyibah* terbentuk *al-ala'qah al-dauliyah* yang *marhamah*.⁵⁵

Lapisan-lapisan umat itu ada antara yang tidak kosong dari lembaga-lembaga keumatan misalnya: anantara rumah tangga yang sakinah dengan komunitas muslim sebagai umat ada konsep ketetangaan (*jiran*) ada ormas-ormas dan partai-partai politik Islam, sekangkan anantara umat Islam berbagai negara dengan umat manusia seluruhnya (dunia internasional), ada lembaga-lembaga internasional Islam semacam Organisasi Konferensi Islam (OKI), Islamic Development Bank (IDB) atau Bank Pembangunan Islam.

Meskipun lembaga-lembaga internasional Islam aktivitasnya belum optimal dilihat dari *siyasah dauliyah* adanya lembaga semacam itu adalah positif karena:

1. Bisa menjadi saluran aspirasi umat Islam diberbagai negara baik dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi untuk diperjuangkan di lembaga bangsa-bangsa di dunia ini semacam PBB.
2. Bisa pula menjadi lembaga-lembaga yang menetralsir ketegangan-ketegangan yang ada intern dunia Islam sendiri.
3. Membantu pertumbuhan budaya dan ekonomi di dunia Islam.

Tampaknya pembagian fuqaha dahulu tentang dunia ini yang membaginya kepada darul Islam dan *Dar al-Harbi* sudah mulai ditinggalkan, pembagian darul Islam dan *Dar al-Harbi* memang sangat tepat sesuai dengan situasi dan kondisi pada waktu para fuqaha hidup yang dihadapkan kepada ancaman-ancaman perang dari dunia luar. Sehingga umat Islam terpaksa berperang untuk mempertahankan diri.

⁵⁵ A. Djazuli, *al-Tadbir*, II, Pusat Pengkajian Islam dan Pranata IAIN Sunan Gunung DJati Bandung, h. 5.

Di dalam suasana perang, menyerang adalah pertahanan terbaik. Itulah yang dilakukan umat Islam masa itu.

Pengaruh ulama yang membagi dunia ini kepada tiga kelompok, yaitu; darul Islam, *Dar al-Ahdi*, dan *Dar-Harbi*. *Dar al-Ahdi* adalah negara-negara yang berdamai dengan darul; al-Islam. Dengan perjanjian tersebut, maka semua penduduk *Dar al-Ahdi* tidak boleh diganggu jiwanya, hartanya, dan kehormatan kemanusiaannya. Meskipun penduduknya tidak beragama Islam, mereka diperlakukan seperti orang Islam dalam arti dilindungi hak-haknya.

Ulama yang berpendapat semacam itu anatara lain. Muhammad bin Hasan Asyaebani murid Imam Abu Hanifah dan gurunya Imam Al-Syafi'i.⁵⁶

Menurut hemat saya pebagian dunia pada masa sekarang adalah:

1. Al-Alam al-Islami (dunia Islam) yang terdiri dari:
 - a) *Dawlah Islamiyah* (negara Islam/ *Islamic States*),
 - b) *Baldah Islamiyah* (negeri muslim/ negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam/*Muslim Countries*).
2. *Al-alam al-Ahdi*: negara-negara yang berdamai dengan negara Islam. *Jihad* lebih diarahkan kepada perjuangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perjuangan menuju ketakwaan kepada Allah SWT. Dan perjuangan untuk tercapainya dunia damai, aman dan makmur material dan spritual sesuai dengan firman Allah:

⁵⁶ Al-Syaibani, Muhammad bin Hasan, *Al-Siyar al-Kabir*, Syirkah Misriyah, Kairo, 1958, h. 133-265.

هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَغْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ
تُوبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ

(QS. Hud 11: Ayat 61)

"Dia menciptakanmu dari bumi dan menugasimu untuk memakmurkannya, maka minta ampunlah kepada-Nya kemudian bertobatlah kepada-Nya, sesungguhnya Tuhanku sangat dekat dan menerima tobat."

Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa Allah yang menciptakan manusia dari bumi dan menguasai manusia untuk memakmurkannya.

Perang bisa saja timbul sekali-kali. Akan tetapi, yang diharapkan oleh *siyasah dauliyah* menghindari dan mengurangi terjadinya perang. Kalau, mungkin, menghilangkannya. Sekalipun prang sering dianggap sebagai sesuatu yang tidak baik, tetapi terpaksa harus dilaksanakan dalam kondisi-kondisi di dalam dan luar negeri tertentu.

Pembagian dunia tersebut di atas bukanlah pembagian yang permanen, artinya bisa terjadi perubahan status dari begara-negara yang ada di dunia tergantung kepada perubahan-perubahan yang terjadi di dalam negeri masing-masing.

Hak sipil dan politik telah diatur Konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik yang diterapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) tanggal 16 Desember 1966. yang kemudian diratifikasi oleh negara Indonesia ke dalam Undang-undang RI Nomer 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Internasional Covenant on Civil and Politics Rights* (Hak-hak Sipil dan Politik). Ada beberapa bagian penting yang diatur dalam Hak Sipil dan Politik yaitu

hak penentuan nasib sendiri, hak untuk hidup, hak untuk tidak diperbudak dan kerja paksa, hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, hak atas kebebasan untuk bergerak dan kebebasan untuk memilih tempat tinggalnya dalam wilayah, mempunyai kedudukan yang sama di hadapan pengadilan dan badan peradilan, hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama, hak untuk berpendapat tanpa campur tangan, hak untuk berkumpul secara damai, hak atas kebebasan untuk berserikat, hak ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, dan hak memilih dan dipilih pada pemilihan umum.

1. Hak Menentukan Nasib Sendiri

Hak untuk menentukan nasib sendiri telah diatur dalam Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik. Pasal 1 ayat (1) menyebutkan:

Semua bangsa berhak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut mereka bebas untuk menentukan status politik mereka dan bebas untuk mengejar status politik mereka dan bebas untuk mengejar kemajuan ekonomi, sosial dan budaya mereka.

Pasal 1 ayat (2) menyebutkan:

Semua bangsa, untuk tujuan-tujuan mereka sendiri, dapat mengelola kekayaan dan sumber daya alam mereka tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban yang timbul dari kerja sama ekonomi internasional, berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan hukum internasional. Dalam hal apa tidak benarkan untuk merampas hak-hak suatu bangsa atas sumber-sumber penghidupannya sendiri.

Ini adalah hak yang dimiliki oleh setiap warga negara dan bangsa untuk tidak dijajah dan diperbudak

oleh bangsa lain, karena penjajahan adalah bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Pengaturan hak ini penting sekali setelah menyaksikan kekejaman akibat penjajahan yang telah merenggut jiwa dan harta bagi bangsa yang dijajah. Segala penderitaan, paksaan, dan penyiksaan telah dialami oleh bangsa-bangsa terjajah. Inilah yang mendasari Konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik untuk mengawali hak untuk menentukan nasib sendiri.

Setiap orang berhak untuk menentukan nasibnya sendiri, baik dari sisi status politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Terbentuknya suatu negara merupakan aspirasi politik dan kesepakatan rakyatnya. Dari aspek teoritik, negara terbentuk karena proses politik dan kontrak sosial yang melibatkan sekelompok orang yang diberi kekuasaan (negara) dan warga negara (rakyat). Rakyat dengan sukarela menyerahkan sebagian kekuasaan dan kewenangan kepada negara, dengan konsekuensi negara wajib membangun rakyatnya. Tidak terkecuali di dalam politik Islam yang memberikan kewenangan kepada penguasa untuk mengatur negara. Di dalam politik Islam dikenal pula majelis syura, yaitu dewan yang memiliki kewenangan untuk memilih dan mengontrol pemerintah. Instrumen pemerintahan Islam melibatkan *ahl al-halli wa al-'aqdi*, yaitu kelompok orang yang menjalankan kewenangan pemerintahan seperti gubernur, hakim, polisi, dan sebagainya.

Hak asasi manusia, terbentuknya suatu negara berawal dari kontrak sosial. Konvenan hak sipil dan politik, yang merupakan generasi HAM pertama dalam sejarah perkembangan HAM, memuat pokok-pokok hak sipil dan politik. Hak sipil berangkat dari konsep kebebasan (*freedom*), di mana setiap orang

harus dijamin untuk terbebas dari tekanan baik dari dalam politik (demokrasi), di mana seseorang dapat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan. Kedua hal tersebut saling mempengaruhi, di samping pula penegakan hukum dan pemerintahan yang bersih.⁵⁷

Demokrasi memiliki hubungan erat dengan hak asasi. Komponen utama dari demokrasi, di antaranya pemegang kedaulatan adalah rakyat, hak untuk menentukan nasib sendiri (*self determination*), kesamaan untuk turut serta berperan dalam membuat kebijakan, dan perlindungan kelompok minoritas dari tirani mayoritas.⁵⁸ Komponen demokrasi ini selaras dengan pasal-pasal dalam hak asasi manusia. Pasal 25 ICCPR secara gamblang memposisikan hak politik itu sebagai hak dasar yang harus di lindungi. Hak politik juga mengandaikan adanya kesempatan untuk turut serta dalam pemerintahan. Dengan demikian, tidak hanya hak (*rights*) tetapi juga kesempatan (*opportunity*).⁵⁹ Negara harus menyediakan perangkat yang memberikan kesempatan kepada warga negaranya untuk turut serta dalam pemerintahan. Jika negara membuat aturan yang membatasi hak politik warga negara, berarti negara telah mencederai hak asasi warga negaranya. Implikasi dari hak politik, negara harus menjalankan pemilihan umum secara jujur dan periodik. Secara jujur berarti pemilihan umum harus dilaksanakan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Periodik berarti pemilihan umum harus dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu.

⁵⁷ Manfred Nowak, *U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary*, (Germany: N.P. Engel, h. 584.

⁵⁸ Manfred Nowak, *U.N. Covenant on Civil and Political Rights*, h. 565.

⁵⁹ Manfred Nowak, *U.N. Covenant on Civil and Political Rights*, h. 569.

Hak politik juga diatur dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia Pasal 21 berikut:

- 1) *Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan penantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.*
- 2) *Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya.*
- 3) *Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah, kemauan ini harus dinyatakan dalam pemilihan-pemilihan berkala yang jujur dan dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang menjamin kebebasan mengeluarkan pendapat.*

Secara konstitusional, melalui UUD 1945, hak turut serta dalam penyelenggaraan negara diakui. Hak yang sama juga diakui dalam UUD No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. bunyi Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, yaitu:

Bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama dalam sistem pemilihan umum yang merupakan bagian dari proses pemerintahan, baik untuk dipilih maupun untuk memilih.

Sementara Pasal 446 UU NO. 39 Tahun 1999 menyatakan:

Setiap warga negara memiliki hak yang sama baik untuk dipilih maupun untuk memilih dalam pemilihan umum melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil

sepanjangn tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Konteks politik, setiap warga negara pada dasarnya diberi hak yang sama untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu. Persamaan hak ini diakui oleh berbagai instrumen internasional dan nasional, misalnya DUHAM Pasal 21 ayat (3), Pasal 25 huruf (b) Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, Pasal 5 Konvensasi Internasional tentang Penghapusan Segala Diskriminasi Rasial, Pasal 7 huruf (a) Konvenasi tentang Penghapusan Segala Bnetuk Diskriminasi terhadap Perempuan, serta Pasal 1 dan 2 Konvenasi tentang Hak Politik Kaum Perempuan. Instrumen nasional pun menjamin, yaitu Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, Pasal 12 Piagam HAM, TAP MPR No. XVII/1998 tentang HAM, dan Pasal ayat (1) dan 14 UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Sekarang Hak-hak Sipil dan Politik, menyatakan:

Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan tanpa pembedaan apa pun seperti tanpa pembatasan yang tidak wajar untuk memilih dan dipilih pada pemilu berkala yang murni dengan hak pilih yang sama dan universal serta diadakan melaui pemungutan suara secara rahasia yang menjamin para pemilih untuk mmenyatakan kehendak mereka secara bebas.

Bunyi Pasal 28D ayat (3), menyatakan:

Bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama dalam system pemilihan umum yang merupakan bagian dari proses pemerintahan, baik untuk dipilih maupun untuk memilih.

Sementara pada Pasal 46 UU No. 39 Tahun 1999 menyatakan:

Setiap warga negara memiliki hak yang sama baik untuk dipilih maupun untuk memilih dalam pemilihan umum melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan di atas menunjukkan bahwa hak untuk dipilih dan memilih adalah hak dasar yang diakui oleh instrumen internasional dan merupakan hak konstitusional karena dijamin oleh UUD 1945.

Hak untuk turut serta dalam pemerintahan baik secara langsung maupun diwakilkan juga dilindungi hukum. Pasal 21 ayat (1) DUHAM, Pasal 25 (a) Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, Pasal 5 Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, Pasal 7 huruf (b dan c) Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, Pasal 12 Piagam HAM, TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM, Pasal 24, 43 ayat (2), dan 44 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Wujud ketiga dari hak turut serta dalam pemerintahan adalah duduk dan diangkat dalam setiap jabatan di pemerintah. Aturan yang mengaturnya antara lain Pasal 21 ayat (2) DUHAM, Pasal 7 huruf (b) dan Pasal 8 Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, Pasal 12 Piagam HAM, TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM, Pasal 43 dan 46 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Konsekuensi dari hak politik yang setara antarwarga negara ini meniscayakan dihapuskannya diskriminasi

politik berdasarkan ras, agama, atau golongan. Diskriminasi ini akan menimbulkan kecurigaan dan konflik di tengah masyarakat dan memposisikan warga negara dalam kelas satu (superior) dan warga negara kelas dua (inferior). Status setiap warga negara adalah sama. Mereka memiliki hak yang sama untuk menentukan pilihan politiknya tanpa perbedaan apa pun.

2. Hak Hidup

Hak hidup merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik telah mengatur hak hidup dalam Pasal 6 ayat (1), yaitu setiap manusia berhak atas hak untuk yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang. Dalam kaitan ini, Kovenan ini mengatur penghapusan mati dalam Pasal 6 ayat (2-5). Pasal 6 ayat (20), menyatakan:

Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat ini dilakukannya kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Kovenan dan Konvensi tentang Pencegahan dan Hukum Kejahatan Genosida. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang berwenang.

Pasal 6 ayat (4), menyatakan:

Setiap orang yang telah dijatuhi hukuman mati berhak untuk memohon pengampunan atau penggantian hukuman. Amnesti, pengampunan atau penggantian hukuman mati dapat diberikan dalam semua kasus.

Pasal 6 ayat (5), menyatakan:

Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dibawah usia delapan belas tahun dan tidak boleh dilaksanakan terhadap perempuan yang tengah mengandung.

Al-Mawardi dalam *al-Ahkam al-Shulthaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah* memberikan rambu-rambu yang tegas dan selektif dalam menjatuhkan pidana mati. Kejahatan pembunuhan dapat dijatuhi pidana mati jika pelakunya adalah orang dewasa, sehat akalnya, kemauan sendiri dan dalam keadaan sadar dan pembuktian harus dilakukan secara jujur dan adil. Pelaku *zina muhsan* dapat dipidana mati jika mampu dihadirkan 4 (empat) orang saksi.

Untuk kasus murtad, menurut Abdullah Ahmed An-Na'im pada zaman sekarang ini tidak relevan dihukum mati. Karena pada dasarnya manusia diberi hak untuk memilih agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaanya. Pidana mati untuk kasus murtad ini, menjadi lambatan bagi komunikasi dan hungunagn atar umut beragama dalam kehidupan sosial modern.⁶⁰

Pada titik ini, negara-negara menyikapi pidana mati berbeda-beda. Ada negara yang menghapuskan pidana mati (*abolisionist*) dan ada negara yang masih menerapkan hukuman mati (*retentionist*). Indonesia termasuk negara yang masih menerapkan hukuman mati. Indonesia sebagai negara yang tidak menghapuskan hukuman mati, sesungguhnya tidak bertentangan dengan Kovenan ini karena putusan hukuman mati dapat dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan dan tidak bertentangan dengan ketentuan Kovenan dan Konvensi tentang Pencegahan dan

⁶⁰ Abdullah Ahmad An-Naim, *Dekonstruksi Syariah*, (Yogyakarta: LKiS, 2004). h. 171.

Hukuman Kejahatan Genosida, akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang berwenang.

3. Hak Bebas dari Perbudakan dan Hak Keamanan Diri

Pada dasarnya, setiap individu tidak diperkenankan untuk diperbudak karena setiap manusia dilahirkan dalam keadaan bebas dan merdeka. Kebebasan dan kemerdekaan setiap individu adalah pemberian Tuhan yang tidak boleh lingkar. Pasal 8 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik menegaskan:

- 1) *Tidak seorang pun dapat diperbudak; perbudakan dan perdagangan budak dalam segala bentuknya harus dilarang.*
- 2) *Tidak seorang pun dapat diperhambakan.*
- 3) *a. Tidak seorang pun dapat diwajibkan untuk melakukan kerja paksa, atau kerja wajib.*
- 4) *b. Ayat 3 (a) tidak boleh menghalangi pelaksanaan kerja paksa sebagai akibat hukuman yang dijatuhkan suatu pengadilan yang berwenang, di negara-negara di mana hukuman dengan kerja paksa dapat dijatuhkan sebagai hukuman terhadap kejahatan.*

Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik Pasal 9 ayat (1): *Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorangpun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.*

Doktrin Islam, terutama yang terekam dalam *Sahib Bukhari*, ada satu pokok bab yang tertulis. yaitu

"Seorang harus memperjuangkan perlindungan bagi ahl al-zimmah dan mereka tidak boleh diperbudak." Ini adakah landasan normatif yang diajarkan Rasulullah dan memperlakukan non-Muslim.

4. Hak Kesetaraan di Depan Pengadilan

Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik Pasal 14 ayat (1): *Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan pengadilan dan badan peradilan. Dalam menentukan tuduhan pidana terhadapnya, atau didalam menentukan segala hak dan kewajibannya dalam suatu gugatan, setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum, oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas dan tidak dibentuk menurut hukummenurut hukum. Media dan masyarakat dapat dilarang untuk mengikuti seluruh atau sebagian sidang karena alasan moral, ketertiban umum atau keamanan nasional dalam suatu masyarakat yang demokratis atau apabila benar-benar diperlukan menurut pendapat pengadilan dalam keadaan khusus, di mana publikasi justru akan merugikan kepentingan keadilan sendiri; namun setiap keputusan yang diambil dalam perkara pidana maupun perdata harus diucapkan dalam sidang yang terbuka, kecuali persidangan tersebut anak-anak menentukan sebaliknya, atau apabila persidangan tersebut berkenaan dengan perselisihan perkawinan atau perwailan anak-anak.*

Sedangkan dalam prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh ulama *Fiqh Siyasah* an ulama-ulama *Fiqh* lainnya, seluruh umat manusia di mata Tuhan adalah sama. Tidak ada hak istimewa yang berdasarkan suku, bangsa, dan golongan. Rasulullah telah mendeklarasikan hal ini.

Orang Arab tidak mempunyai keunggulan atas orang non-Arab, begitu juga orang non-Arab tidak

mempunyai keunggulan atas orang Arab. demikian juga orang kulit putih tidak memiliki keunggulan atas orang hitam atau orang hitam tidak mempunyai keunggulan atas orang kulit putih. Semua adalah anak keturunan Adam dan Adam diciptakan dari tanah liat (HR. Muslim).

5. Hak Kebebasan Berpikir, Keyakinan, dan Beragama

Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik Pasal 14 menyebutkan:

- 1) *Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan, dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran.*
- 2) *Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.*
- 3) *Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.*

Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik Pasal 19:

- 1) *Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan.*

- 2) *Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dan pemikiran apa pun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.*

Menurut Syekh Syaikat Hussain, ulama di dalam menafsirkan Islam tidak pernah membelenggu gerak pikiran sehat yang berusaha menggapai hakikat dan menggelitik keraguan sebagai jembatan untuk sampai pada keyakinan. Nabi Muhammad telah membebaskan pikiran dari belenggu. Jahiliah dan membawanya melampaui alam kasat mata berjalan menuju alam-alam gaib sampai ke alam yang tak nampak oleh mata telanjang dan tidak pula terlintas dalam benak manusia.⁶¹

Ayat pada Al-Quran, orang-orang yang berilmu memiliki kedudukan yang tertinggi di hadapan Allah. karena dapat memberi banyak manfaat kepada orang lain. Karena itulah, kebebasan berpikir adalah bagian dari usaha memperoleh ilmu yang tertinggi yang dimanfaatkan untuk tujuan menyiarkan kebijakan serta tidak untuk menyebarkan kejahatan dan kezaliman. Rasullah selama hidupnya telah memberikan kebebasan kepada umat Islam untuk mengungkapkan pendapat mereka yang berbeda. Rasullah telah menempa kepribadian para sahabat sedemikian rupa sehingga mereka dapat mengekspresikan perbedaannya tanpa ragu-ragu.

⁶¹ Syekh Syaikat Hussain, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1996), h. 18.

Perang Uhud, ketika Rasulullah meminta para sahabat untuk melawan musuh di dalam kota Madinah, mereka bertanya mengenai posisi Rasulullah berkaitan dengan pendapat yang dikemukakan. Ketika Rasulullah berkata bahwa ia berpendapat sebagai manusia biasa dan tidak berdasarkan wahyu ilahi, maka para sahabat tetap mempertahankan pendapat mereka sendiri sehingga Rasulullah setuju untuk berperang di medan pertempuran Uhud sesuai dengan keinginan mereka. Pertanyaan sahabat mengenai posisi Rasulullah ketika menyarankan tindakan tertentu dan desakan menunjukkan dengan jelas mentalitas yang telah ditanamkan Rasulullah di antara para sahabatnya.⁶²

Khalifah Abu Bakar biasa mengundang kaum Muslim untuk meminta kritik dari mereka jika salah dalam suatu persoalan, dan kaum Muslim pun mengkritik tanpa ragu-ragu. Sejauh mana kebebasan berpikir itu berlaku selama era al-Khulafah al-Rasyidun dapatlah digambarkan dari suatu insiden ketika Umar dalam perjalanan ke Syiria mengucapkan di depan umum alasan memecat Khalid bin Wahid. Kemudian ada seseorang berdiri berkata, :Wahai Umar, demi Allah, engkau telah berlaku tidak adil. Engkauteh menyarungkan kembali pedang yang telah dicanangkan oleh Rasulullah. Engkau telah melepaskan tali persaudaraan. Engkau telah merasa marah karena kesetiaan kepada saudaramu".⁶³

Kesempatan lain, ada seseorang berdiri dan terus-menerus berkata, "Wahai Umar, takutlah kepada Allah." Lalu salah seorang dari mereka yang hadir menahannya agar tidak berbicara lebih banyak, tapi Umar berkata, "Biarlah dia berkata, jika orang-orang

⁶² Syekh Syaikat Hussain, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, h. 72.

⁶³ Syekh Syaikat Hussain, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, h. 72-73.

ini tidak berbicara, maka mereka akan sia-sia berada di sini, dan jika kita tidak mendengarkan mereka, maka kita ini pun tidak berguna".⁶⁴

3. Islam dan politik identitas kontemporer

Bentuk ekstrem politik identitas adalah mencuatnya sampai batas-batas tertentu gagasan tentang separatisme. Ini terlihat misalnya di *Quebeck*, yang berbahasa dan berbudaya Perancis, yang ingin memisahkan diri dari bangsa Kanada yang berbahasa Inggris. Begitu juga terbaca dalam gerakan Islam tipikal Louis Farrakhan (l. 1933) dengan *The Nation of Islam*-nya di Amerika Serikat, tetapi yang ditolak oleh kelompok hitam Muslim arus besar lainnya. Tetapi pada tahun 2000 politik identitas keagamaan model ini dapat diatasi dengan tercapainya perdamaian antara Farrakhan dengan Wareeth Din Muhammad, mantan saingannya,⁶⁵ untuk meredam politik identitas kelompok Muslim Hitam untuk kemudian menyatukan dirinya dengan arus besar bangsa Amerika yang plural. Dalam pandangan Gutmann, politik identitas, yang juga terlihat pada gerakan Martin Luther King dan uskup-uskup Katolik di Amerika, sesungguhnya lebih didorong oleh argumen keadilan sosial, bukan karena alasan agamanya.⁶⁶

⁶⁴ Syekh Syaikat Hussain, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, h. 73.

⁶⁵ <https://internasional.kompas.com/read/2021/04/03/143540370/apa-itu-nation-of-islam?page=all>

⁶⁶ "The Anti-Politics of Identity," *Socialist Riview*, No. 1, Vol. 20 (Jan-Maret 1990), h. 67-68. Analisis yang lebih konferhensif tentang politik identitas ini dapat dibaca dalam karya Ammy Gutmann, *Identity of Democracy* (Princeton, New Jersey: Princeton Univercity Press, 2003, setebal 211 halaman plus catatan akhir dan indeks.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman, H.I, *Sistem Politik Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h.174
- Ahmad Syafii Maarif, *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*, (Jakarta: Democrazy Project wdisi digital, 2012), h.13
- Amiruddin dan Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Balai Pustaka, 2006.h. 107
- Ana Irhandayaningsih, “Kajian Filosofi Terhadap Multikulturalisme Indonesia”, *E-Jurnal Humanika* Vol 15 No 09 (Juni 2012) h. 3
- Arend Lijphart, *Electoral System and Party Systems: A Study of Twenty-Seven Democracies 1945-1990*, Oxford UP, New York, 1995, h.153
- Arya Fernandes, *Politik Identitas dalam Pemilu 2019:Proyeksi dan Efektivitas*, (Jakarta :Centre for Strategic and International Studies, Jakarta, 2018). h. 6
- Bambang Cipto, *Partai Kekuasaan dan Militarisme*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000, h. 22
- Banyamin Molan, *Multikulturalisme Cerdas Membangun Hidup Bersama Yang Stabil dan Dinamis*, (Jakarta: PT. Indeks, 2015),vi
- Budi Setyono, *Revolusi belum selesai : kumpulan pidato presiden Soekarno 30 September 1965 pelengkap nawaksara*, (Jakarta; Serambi Ilmu Semesta), 2014, h. 44
- Budiardjo, Miriam, *Demokrasi di Indonesia, Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), h.21
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, h. 128
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).Edisi Ke-2. h. 751

Djazuli, *Fiqh Siyâsah*, (Damascus: Dâr al-Qalam, 2007), h. 45

H.A.R Tilaar, *Mengindonesiakan Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 16

Ikrar Nusa Bhakti. *The Transition To Democracy In Indonesia: Some Outstanding Problems. Dalam In The Asia Pacific : A Region in Transition* , ed. Jim Rolfe. (Honolulu: The Asia Pacific for Sceurity Studies) h. 200

Irvan marwadi, *Dinamika Sengketa Hukum Administrasi di Pemilukada*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2014), h. 79

Janedri M Goffar, *Demokrasi Konstitusi Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Konstitusi Pers, Jakarta, 2012, h.121

Jimly Assiddiqie, *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD NRI 1945*, UU Press, Yogyakarta, 2004 h. 107.

Juhana Nasrudin dan Ahmad Ali Nurdin, *Politik Identitas Dan Representasi Politik* (Studi Kasus pada Pilkada DKI Periode 2018 - 2022) Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama h. 40

Laode, *Etnis Cina Indonesia dalam Politik* (Jakarta: Yayasan Obor , 2012) h.38

Laporan Final 2004, *European Union General Election Monitoring Mission in Indonesia*, (2004) h. 7

Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. Ke 22 (Bandung: Raja Resdakarya, 2004), h. 174

M Nurun Najib, “Kontruksi Identitas Keagamaan (Studi tentang pondok pesantren Al-Mukmin ngruki dengan Masyarakat Lokal)”, (Thesis tidak diterbitkan, Universitas Indonesia) h. 5

M. Sanusi, *Kenangan Inspiratif Orde Lama dan Orde Baru*, (Jakarta; Serambi Baru), 2014, h. 31

Mahfud M.D, *Politik Hukum Di Indonesia, Rajawali*, Jakarta, 2010. h. 94

- Manuel Castells, *The Power Of Identity: The Information Age, Economy, Society and Cultural*, Vol II (Australia: Blacwell Publishing, 2003) h.7
- Michael Buehler. *Islam and Democracy in Indonesia Insight Turkey*. Vol 11 (Istanbul : Insight Turkey, 2009) h. 51
- Mijamil, Qomar. *Pesantren dari Transfirmasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, (Jakarta: Erlangga Anggota IKAPI), h. 29
- Miriam Budiardjo, *Demokrasi di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999), h. 243
- Mr.S.M.Amin, *Demokrasi Selayang Pandang*, Cetakan Kedua, Pradyna Paramita, Jakarta, 1981, h. 5-4
- Muhtar Haboddin, ‘Menggugat Politik Identitas Di Ranah Lokal’, *Jurnal Studi Pemerintahan Universitas Brawijaya* Vol 3 No 1, (Febuari 2012), h. 4
- Parsudi Suparlan, *Hubungan Antar Suku Bangsa*, (Jakarta: KIK Press, 2004), h. 25
- Purwanto, “*Politik Identitas dan Resolusi Konflik Transformatif*”, *Jurnal Review Politik* Vol. 05, No. 01, Juli 2020. 61-62.
- Richard Parker, “*Five These On Identity Politice*”, *Harvard Journal of Law & Public Policy* Vil. 29, No.01.2005, 55.
- Robert W Hefner, *Politik Multikulturalisme;Menggugat Realitas Kebangsaan*, (Yogyakarta: Knisius, 2011), h.16
- Sri AstutiBuchari, *Kebangkitan Etnis Menuju politik Identitas*, (Jakarta: YOI,2014), h. 27
- Undang-undang Politik* 2003, UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan umum, h. 35
- Undang-undang* Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- Zubaidi, “Telaah Konsep Multikulturalisme dan Implementasi dalam Dunia Pendidikan”, (Thesis tidak diterbitkan IAIN Sunan Kalijaga), h. 2